

**ANALISIS PENGARUH DIMENSI INDEKS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

Skripsi

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Saffanah Salsabila

NIM: 31401700147

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2022

**ANALISIS PENGARUH DIMENSI INDEKS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

Skripsi

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Saffanah Salsabila

NIM: 31401700147

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Usulan Penelitian Untuk Skripsi

ANALISIS PENGARUH DIMENSI INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

Disusun Oleh:


Saffanah Salsabila

Nim: 31401700147

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan ke hadapan sidang panitia ujian Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 03 Januari 2022

Pembimbing,



Dedi Rusdi, SE., M.Sr., Akt., CA

NIK. 211496006

**ANALISIS PENGARUH DIMENSI INDEKS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN
KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

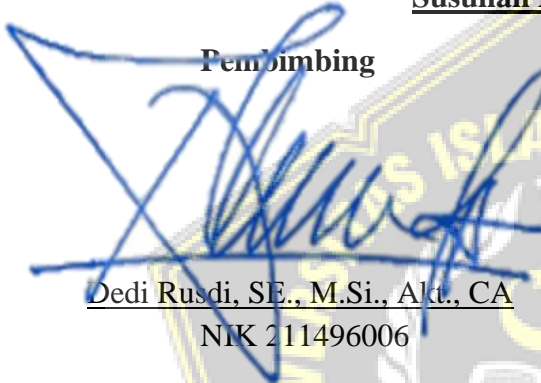
Disusun Oleh:
Saffanah Salsabila
Nim: 31401700147


Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 28 Januari 2022

Susunan Dewan Penguji


Pembimbing

Penguji 1


Dedi Rusdi, SE., M.Si., Akt., CA
NIK. 211496006


Provita Wijayanti, SE, M.Si, Ak., CA
NIK. 211403012

Penguji 2


Khoirul Fuad, SE, M.Si, Ak, CA
NIK. 211413023

Skripsi ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi tanggal 28 Januari 2022

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Dra. Winarsih, SE., M.Si
NIK. 211415029

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saffanah Salsabila

NIM : 31401700147

Jurusan : S1 - Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**ANALISIS PENGARUH DIMENSI INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**” merupakan benar-benar hasil karya peneliti saya sendiri, bukan hasil adanya *plagiarisme* dari karya peneliti orang lain baik sebagian atau seluruh dan tidak menggunakan karya peneliti orang lain tanpa dengan menyebutkan sumber aslinya. Skripsi ini dikutip sesuai dengan kode etik ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 13 September 2021
Yang menyatakan,



Saffanah Salsabila
NIM. 31401700147

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saffanah Salsabila

NIM : 31401700147

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Alamat Asal : Jl. Gurame Selatan A/7, Sebantengan, Kec. Ungaran Barat,
Kab. Semarang, Jawa Tengah

No. HP/Email : 085225566655/ saffanahs@std.unissula.ac.id

Dengan ini, saya menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir~~/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul: **“ANALISIS PENGARUH DIMENSI INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Ungaran, 03 Januari 2022
Yang menyatakan,



Saffanah Salsabila
NIM. 31401700147

*Coret yang tidak perlu

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saffanah Salsabila
NIM : 31401700147
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat Asal : Jl. Gurame Selatan A/7, Sebantengan, Kec. Ungaran Barat,
Kab. Semarang, Jawa Tengah
No. HP/Email : 085225566655/ saffanahs@std.unissula.ac.id

Dengan ini, saya menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul: **“ANALISIS PENGARUH DIMENSI INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Ungaran, 03 Januari 2022
Yang menyatakan,



Saffanah Salsabila
NIM. 31401700147

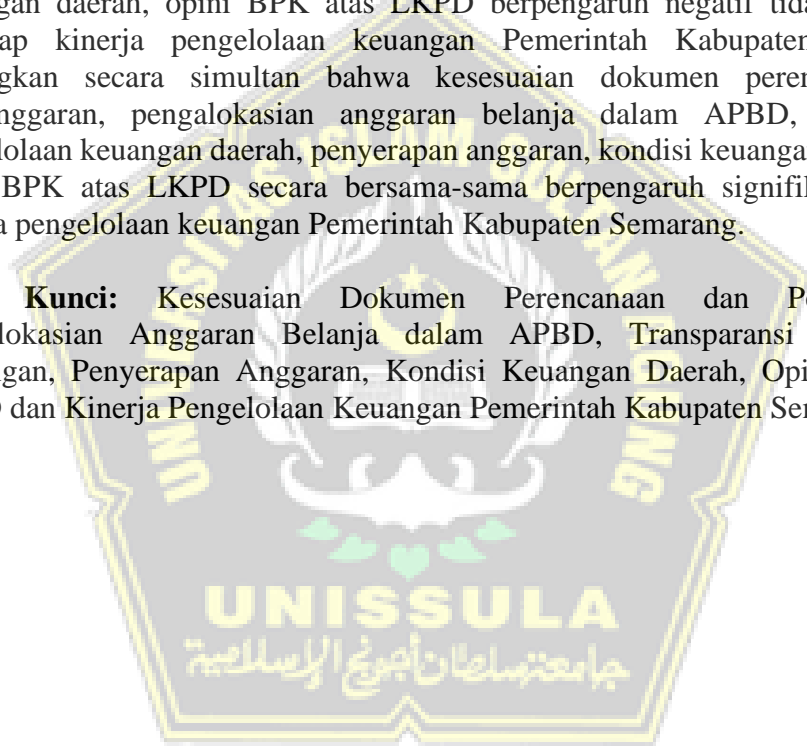
*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh 6 dimensi indeks pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang. Populasi penelitian adalah pejabat seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Semarang berjumlah 91 orang dan sampel adalah 78 orang menggunakan *Sampling Purposive*. Jenis penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif dengan data primer, metode kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data, uji kualitas instrumen dan uji kualitas data (analisis regresi linier berganda) dengan bantuan SPSS Statistics 22.

Hasil penelitian secara parsial bahwa dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan, penyerapan anggaran, berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang, kondisi keuangan daerah, opini BPK atas LKPD berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang. Sedangkan secara simultan bahwa kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini BPK atas LKPD secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Kata Kunci: Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD, Transparansi Pengelolaan Keuangan, Penyerapan Anggaran, Kondisi Keuangan Daerah, Opini BPK atas LKPD dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

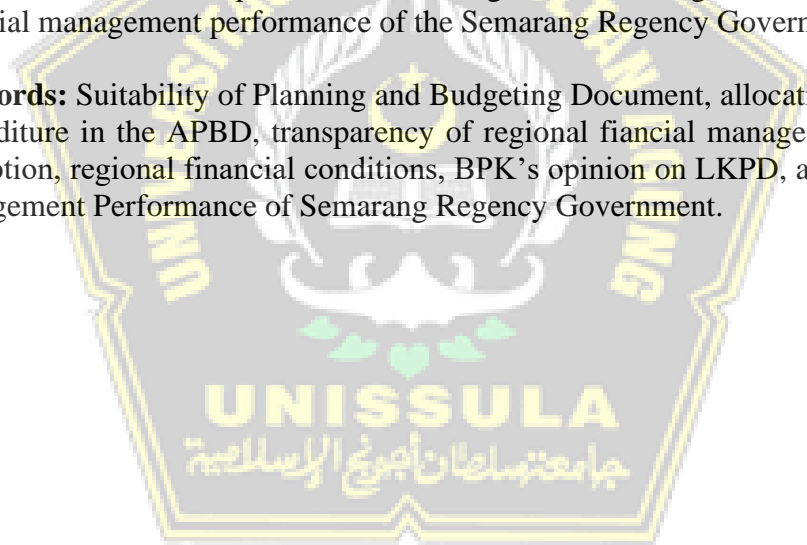


ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of the 6 dimensions of the regional financial management index on the financial management performance of the Semarang Regency Government. The study population was officials of the entire Semarang Regency Regional Apparatus Organization totaling 91 people, sample was 78 people using *Purposive Sampling*. Descriptive type of research quantitative approach with primary data, questionnaire methods and documentation. Data analysis techniques of instrument quality tests and data quality tests (multiple linear regression analysis) with the help of SPSS Statistics 22.

The results of the study were partially that the planning and budgeting documents, the allocation of budget in the APBD, transparency of regional financial management, budget absorption, had an insignificant positive effect on the performance of the financial management of the Semarang Regency Government, the financial conditions of the regions, the BPK's opinion on the LKPD had a negative effect on the performance of the financial management of the Semarang Regency Government. Meanwhile, it simultaneously shows that the suitability of planning and budgeting document, allocation of budget expenditure in the APBD, transparency of regional financial management, budget absorption, regional financial conditions, and BPK's opinion on LKPD together have a significant effect on the financial management performance of the Semarang Regency Government.

Keywords: Suitability of Planning and Budgeting Document, allocation of budget expenditure in the APBD, transparency of regional financial management, budget absorption, regional financial conditions, BPK's opinion on LKPD, and Financial Management Performance of Semarang Regency Government.



INTISARI

Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah adalah salah satu berukuran yang bisa dipakai buat memastikan kemampuan daerah untuk melaksanakan anggaran keuangan secara baik dan benar buat mempertahankan layanan yang diinginkan, pada mana evaluasi yang lebih tinggi sebagai tuntutan yang wajib dipenuhi supaya pihak eksternal dapat menetapkan buat berinvestasi pada suatu daerah (Tahir et al., 2018).

Otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan bagi daerah dalam mengelola secara maksimal potensi daerah, agar dapat mensejahterakan masyarakat. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya upaya akuntabel dan transparan.

Ketua Badan Pengawasan Keuangan (BPK), Agung Firman menyampaikan, BPK menemukan 5.480 permasalahan pengelolaan anggaran pemerintah pusat dan daerah dalam 4.094 temuan. Meliputi kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan dan didominasi permasalahan yang tidak hemat, tidak efisien dan tidak efektif (Prabawanti, 2020).

Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sudah menyelesaikan secara Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2020 sesuai waktu walaupun dengan situasi sulit di pandemi Covid-19. Ketua BPK Agung Firman Sampurna telah menyatakan IHPS terdiri dari 680 hasil pemeriksaan.

Kabupaten Semarang diberikan penghargaan dari Menteri Keuangan RI atas kinerja pengelolaan dan pelaporan keuangan sudah dinilai baik dalam delapan

tahun terakhir. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang kembali mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penghargaan yang diterima 10 kali berturut-turut yaitu WTP merupakan hasil kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif setelah menerima hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kabupaten Semarang oleh BPK RI (Admin, 2021).

Menurut penelitian (Ariesmawati, 2020) menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja perangkat daerah pada Bappeda Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya penelitian (Armaja, 2015) menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Aceh dan penelitian yang dilakukan oleh (Garini, 2015) juga sama menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel berikutnya dari penelitian (Purnama, 2016) menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dan penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2020) menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. variabel lain dari penelitian (Priagung et al., 2016) menunjukkan bahwa penyerapan anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Banjarnegara dan penelitian yang dilakukan oleh (Arniwita et al., 2019) menunjukkan bahwa penyerapan anggaran belanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi Pemerintah Provinsi Jambi. Selanjutnya dari penelitian (Leki, 2018) menunjukkan

bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Halmahera Barat dan penelitian yang dilakukan oleh (Tahir et al., 2018) menunjukkan bahwa faktor pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Makassar. Variabel terakhir dalam penelitian ini dilakukan oleh (Parwanto, 2017) menunjukkan bahwa tidak semua hasil pemeriksaan BPK berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dan penelitian yang dilakukan oleh (Pradnyani, 2020) menunjukkan bahwa opini audit BPK berpengaruh positif pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2013-2017.

Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang sebanyak 91 orang. Sampel yang digunakan sebanyak 78 orang menggunakan metode *Sampling Purposive* dengan 4 kriteria inti yaitu: pertama, pejabat Struktural Barenlitbangda, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kasubag dan Kasubdit; pejabat Struktural Badan Keuangan Daerah, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kasubag dan Kasubdit; pejabat Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kasubag dan Kasubdit; dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan seluruh Perangkat Daerah. Pada penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala likert 7 poin. Teknik analisis dalam penelitian menggunakan uji kualitas instrumen (uji analisis statistik deskriptif) dan uji kualitas data (uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis) dengan menggunakan bantuan SPSS Statistics 22.

Berdasarkan hasil dalam penelitian dapat menjelaskan bahwa secara parsial yaitu hipotesis pertama yaitu ditolak, hipotesis kedua ditolak, hipotesis ketiga ditolak, hipotesis keempat ditolak, hipotesis kelima ditolak, dan hipotesis keenam ditolak dan secara simultan yaitu hipotesis diterima. Dari hasil hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial menunjukkan kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan, penyerapan anggaran berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kondisi keuangan daerah, opini BPK atas LKPD berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini BPK atas LKPD secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang pada Organisasi Perangkat Daerah.

MOTTO

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

“Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Dan (shalat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang Khusyuk.”

(Q.S Al-Baqarah:45)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(Q.S Al-Baqarah:153)

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman”.

(Q.S Ali Imran: 138)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَتَحَسَّبُوْا مِنْ يُوسُفَ وَآخِيْهِ وَلَا تَأْسُوْا مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَأْسُ مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ

الْكٰفِرُوْنَ

“Wahai anak-anakku! Pergilah kamu, carilah (berita) tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir”.

(Q.S Yusuf: 87)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini akan saya persembahkan untuk:

- Bapak dan ibu yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan motivasi kepada penulis
- Dosen pembimbing yang selalu memberikan saran terbaik kepada penulis
- Sahabat-sahabatku yang tersayang
- Teman-teman Akuntansi E4 Angkatan 2017 yang tidak bisa disebut satu persatu
- Almamater, FE UNISSULA Semarang



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan Nabi kita. Atas doa serta bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGARUH DIMENSI INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar S1 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kesulitan dan rintangan serta hambatan. Adanya bantuan, bimbingan, motivasi, dorongan, saran dan kritik, dan pengarahan dari berbagai pihak yang terlibat di dalam penulisan skripsi ini serta akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan syukur dan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, terimakasih atas segala bantuan, kesempatan, dan pembelajaran yang telah diberikan. Terimakasih karena selalu mendengarkan keluhan saya.
2. Prof. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Dra. Winarsih, SE, M.Si., Akt., CA., CSRS selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dedi Rusdi, SE., M.Si., Akt., CA. Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan saran dan kritik untuk saya dalam menyusun skripsi ini dengan sabar dan ikhlas bagi peneliti.
5. Rekan-rekan seperjuangan saya yaitu Revita, Ulya, Tina, Mimin, Zulfika dan Yosi serta teman-teman kelas E4 2017.

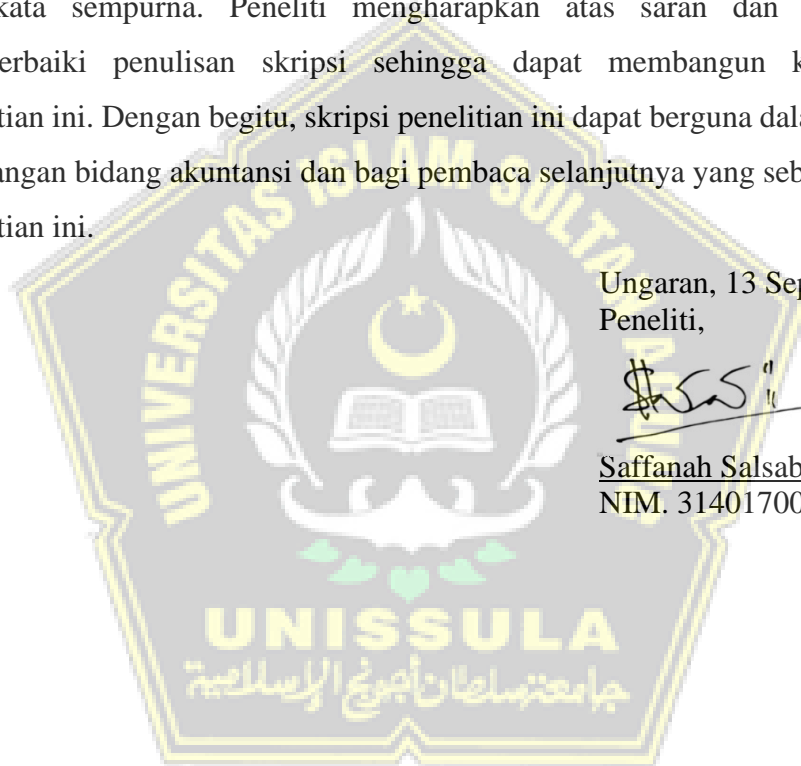
6. Teman SMA Mita Hamidah yang selalu memberikan saya dukungan dan motivasi serta semangatnya.
7. Orang tua yang saya hormati dan dicintai. Mereka selalu mendoakan, memberikan saran, arahan, semangat setiap saat, berguna bagi saya, dan selalu mau direpotkan oleh saya. Terimakasih atas semua yang telah diberikan bagi saya agar saya dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan yang terbaik bagi mereka.
8. Seluruh pihak yang sudah membantu penyelesaian penulisan pra skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Peneliti mengharapkan atas saran dan kritik dalam memperbaiki penulisan skripsi sehingga dapat membangun kesempurnaan penelitian ini. Dengan begitu, skripsi penelitian ini dapat berguna dalam penerapan di lapangan bidang akuntansi dan bagi pembaca selanjutnya yang sebidang dengan penelitian ini.

Ungaran, 13 September 2021
Peneliti,



Saffanah Salsabila
NIM. 31401700147



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
INTISARI.....	ix
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.4.1 Manfaat Teoritis	13
1.4.2 Manfaat Praktis.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Teori Keagenan.....	15
2.2 Variabel – Variabel Penelitian.....	18
2.2.1 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).....	18
2.2.2 Dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	19

2.2.3	Pengelolaan Keuangan Daerah	28
2.2.4	Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	28
2.3	Penelitian Terdahulu	29
2.4	Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Pemikiran	43
2.4.1	Pengaruh Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang	43
2.4.3	Pengaruh Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang	46
2.4.4	Pengaruh Dimensi Penyerapan Anggaran Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang	47
2.4.5	Pengaruh Dimensi Kondisi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang	49
2.4.6	Pengaruh Dimensi Opini BPK Atas LKPD Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang	50
2.5	Kerangka Penelitian	51
BAB III METODE PENELITIAN.....		52
3.3	Jenis Penelitian.....	52
3.2	Populasi dan Sampel	52
3.2.1	Populasi	52
3.2.2	Sampel	55
3.3	Sumber dan Jenis Data.....	56
3.4	Metode Pengumpulan Data	57
3.5	Variabel, Definisi Operasional dan Indikator	59
3.5.1	Variabel	59
3.5.2	Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	59
3.6	Teknik Analisis	63
3.6.1	Uji Kualitas Instrumen.....	63
3.6.2	Uji Kualitas Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		69
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian/Responden.....	69
4.1.1	Deskripsi Karakteristik Data Responden	71

4.2	Deskripsi Variabel Penelitian	75
4.2.1	Tanggapan Responden Terhadap Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (X1).....	76
4.2.2	Tanggapan Responden Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD (X2).....	77
4.2.3	Tanggapan Responden Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X3).....	79
4.2.4	Tanggapan Responden Terhadap Penyerapan Anggaran (X4)	80
4.2.5	Tanggapan Responden Terhadap Kondisi Keuangan Daerah (X5).....	81
4.2.6	Tanggapan Responden Terhadap Opini Badan Pemeriksaan Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (X6).....	82
4.2.7	Tanggapan Responden Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang (Y)	83
4.3	Teknik Analisis	85
4.3.1	Uji Kualitas Instrumen.....	85
4.3.2	Uji Kualitas Data	89
4.4	Pembahasan Hasil Penelitian	112
4.4.1	Pengaruh Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang	112
4.4.3	Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang	116
4.4.4	Pengaruh Penyerapan Anggaran Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.....	118
4.4.5	Pengaruh Kondisi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.....	120
BAB V PENUTUP.....		124
5.1	Simpulan	124
5.2	Implikasi	127
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	128
5.4	Agenda Penelitian Mendatang	129
DAFTAR PUSTAKA		130
LAMPIRAN.....		135

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Rincian Populasi Penelitian	53
Tabel 3.2 Kriteria Sampel	56
Tabel 3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	59
Tabel 4.1 Penyebaran Kuesioner.....	69
Tabel 4.2 Rincian OPD Di Kuesioner Yang Dapat Diolah.....	70
Tabel 4.3 Usia Responden.....	71
Tabel 4.4 Jenis Kelamin Responden	72
Tabel 4.5 Pendidikan Terakhir Responden	73
Tabel 4.6 Lama Kerja Responden.....	74
Tabel 4.7 Pangkat/Golongan Responden	74
Tabel 4.8 Kategori Nilai Indeks	76
Tabel 4.9 Tanggapan Responden Terhadap Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	76
Tabel 4.10 Tanggapan Responden Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	78
Tabel 4.11 Tanggapan Responden Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	79
Tabel 4.12 Tanggapan Responden Terhadap Penyerapan Anggaran.....	80
Tabel 4.13 Tanggapan Responden Terhadap Kondisi Keuangan Daerah	81
Tabel 4.14 Tanggapan Responden Terhadap Opini BPK Atas LKPD	82
Tabel 4.15 Tanggapan Responden Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang	84
Tabel 4.16 Analisis Statistik Deskriptif	85
Tabel 4.17 Hasil Uji Validitas Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	91
Tabel 4.18 Hasil Uji Validitas Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD ..	91
Tabel 4.19 Hasil Uji Validitas Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	92
Tabel 4.20 Hasil Uji Validitas Penyerapan Anggaran	92
Tabel 4.21 Hasil Uji Validitas Kondisi Keuangan Daerah	93
Tabel 4.22 Hasil Uji Validitas Opini BPK Atas LKPD.....	94
Tabel 4.23 Hasil Uji Validitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang	94
Tabel 4.24 Hasil Uji Reliabilitas	96
Tabel 4.25 Hasil Uji Multikolinearitas.....	97
Tabel 4.26 Hasil Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test)	100
Tabel 4.27 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	101
Tabel 4.28 Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji t)	104
Tabel 4.29 Hasil Uji Hipotesis Simultan (Uji F)	109
Tabel 4.30 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	51
Gambar 3.1 TABEL 1 (Table for Determining Sample Size from a Given Population).....	55
Gambar 4.1 Tabel r	90
Gambar 4.2 Grafik Scatterplot (Hasil Uji Heteroskedastisitas).....	98
Gambar 4.3 Grafik Histogram (Hasil Uji Normalitas)	99
Gambar 4.4 Grafik Normal P-P Plot (Hasil Uji Normalitas).....	100
Gambar 4.5 Tabel F.....	110



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Ekonomi.....	136
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian.....	140
Lampiran 3 Data Tabulasi.....	149
Lampiran 4 Hasil Uji Kualitas Instrumen	162
Lampiran 5 Hasil Uji Kualitas Data.....	163
Lampiran 6 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	172
Lampiran 7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	175
Lampiran 8 Hasil Uji Hipotesis	176



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi Daerah dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan bagi daerah dalam mengelola secara maksimal potensi daerah, agar dapat mensejahterakan masyarakat. Harapannya, berdasarkan otonomi daerah dapat tercapai efisiensi, efektivitas dan transparansi sesuai peraturan yang ada, terutama berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Hal ini berarti dalam otonomi daerah yang tercangkup 3 (tiga) misi utama, yaitu: 1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah; 2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; 3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan (Saraswati, 2018).

Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya upaya akuntabel dan transparan. “Tata keuangan kelola negara, aturan akuntabel harus diwujudkan. Aturan tata kelola transparan harus dikembangkan. Aturan tata kelola efektif dan efisien, yang gesit, lincah, dan cekatan menghadapi perubahan juga harus terus diupayakan,” kata Jokowi dalam Pidato Sidang Tahunan MPR/DPR RI di gedung MPR/ DPR RI, Jumat (16/08/2019).

Ketua Badan Pengawasan Keuangan (BPK), Agung Firman menyampaikan, BPK menemukan 5.480 permasalahan pengelolaan anggaran pemerintah pusat dan daerah dalam 4.094 temuan. Adapun temuan yang dimaksud

meliputi kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan dan didominasi permasalahan yang tidak hemat, tidak efisien, dan tidak efektif. “Rinciannya sebanyak 51% (persen) atau 2.784 masalah ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan dari Rp. 1,35 triliun,” kata Agung saat Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Kemudian, lanjut dia, 1.725 masalah ketidakpatuhan atau 31% (persen) mengakibatkan kerugian. Potensi kerugian dan penerimaan kurang dari Rp. 6,25 triliun dan 971 masalah atau 18% (persen) berasal dari sistem pengendalian intern yang lemah (Prabawanti, 2020).

Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sudah menyelesaikan secara Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2020 sesuai waktu walaupun dengan situasi sulit di pandemi Covid-19. Jokowi telah menyampaikan pada penerimaan pimpinan dan anggota BPK RI di Istana Merdeka, Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/11/2020).

Ketua BPK Agung Firman Sampurna telah menyatakan IHPS terdiri dari 680 hasil pemeriksaan. Diantaranya ada 634 yaitu laporan hasil pemeriksaan keuangan, 7 laporan hasil pemeriksaan kinerja, serta 39 laporan hasil pemeriksaan sesuai tujuan tertentu. Menurut Agus, BPK telah juga memverifikasi 541 dari 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diantaranya pemerintah Kabupaten Waropen, Papua, dan yang belum memberikan laporan keuangannya. Dimana pemerintah provinsi, 100% (persen) sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara pemerintah kabupaten, 364 dari 415 pemerintah kabupaten sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan

pemerintah kota, 87 dari 93 pemerintah kota sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Tambun, 2020).

Kabupaten Semarang diberikan penghargaan dari Menteri Keuangan RI atas kinerja pengelolaan dan pelaporan keuangan sudah dinilai baik dalam delapan tahun terakhir. Penghargaan tersebut diberikan karena Pemerintah Kabupaten Semarang dianggap mampu mengelola keuangan negara dengan baik dan salah satu indikatornya adalah pencapaian opini WTP dari BPK (Permana, 2019).

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang kembali mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penghargaan yang diterima Kabupaten Semarang sudah yang Ke-10 kalinya, diraih secara berturut-turut tanpa berhenti. Data yang terkumpul menunjukkan bahwa Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) minimal sebanyak 10 kali berturut-turut dari tahun 2011- tahun 2020 yang diberikan kepada 59 entitas pelaporan keuangan. Yaitu 25 kementerian/lembaga, 5 provinsi, 13 kota, dan 16 kabupaten. Salah satu dari empat Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang yang mendapatkan penghargaan tersebut. Selain Kabupaten Semarang tiga lainnya yaitu Kabupaten Boyolali, Banyumas, dan Jepara (Agung, 2021).

Penghargaan yang diterima 10 kali berturut-turut yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan hasil kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif setelah menerima hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kabupaten Semarang oleh BPK RI (Admin, 2021).

Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah tidak cukup hanya diberikannya Opini WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan predikat WTP atas hasil audit Laporan Keuangan Kementerian Keuangan oleh BPK tidak mencerminkan bahwa anggaran yang dikelola kementeriannya sudah efektif dan efisien. Selain itu, predikat WTP juga tidak menjamin pengelolaan keuangan pemerintah bebas korupsi. Menurutnya, predikat WTP hanya menunjukkan bahwa kementeriannya patuh dengan rambu-rambu laporan keuangan (Gumelar, 2018).

Pemerintah daerah dan pihak eksternal termasuk sebagai suatu hal penting untuk kinerja pengelolaan keuangan daerah. Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah adalah salah satu berukuran yang bisa dipakai buat memastikan kemampuan daerah untuk melaksanakan anggaran keuangan secara baik dan benar buat mempertahankan layanan yang diinginkan, pada mana evaluasi yang lebih tinggi sebagai tuntutan yang wajib dipenuhi supaya pihak eksternal dapat menetapkan buat berinvestasi pada suatu daerah (Tahir et al., 2018).

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Sedangkan, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah oleh Kepala Daerah perlu dilakukan suatu pengukuran, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi: 1) kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; 2) pengalokasian anggaran belanja dalam APBD; 3) transparansi pengelolaan keuangan daerah; 4) penyerapan anggaran; 5) kondisi keuangan daerah; dan 6) opini Badan Pemeriksaan Keuangan atas LKPD. Dari pengukuran 6 (enam) dimensi ini akan diketahui pengaruh dimensi IPKD di Kabupaten Semarang. Belum terdapat penelitian secara menyeluruh tentang analisis pengaruh dimensi IPKD terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah, penelitian yang sudah ada hanya secara parsial untuk setiap dimensi.

Penelitian ini dilakukan karena adanya fenomena *research gap* (hasil temuan penelitian yang berbeda-beda). Penelitian tentang kinerja pengelolaan keuangan daerah telah banyak dilakukan oleh para penelitian terdahulu, seperti penelitian (Ariesmawati, 2020) menunjukkan bahwa perencanaan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja perangkat daerah pada Bappeda Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dan penganggaran juga mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja perangkat daerah pada Bappeda Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diperhitungkan sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Belanja daerah yang wajib diprioritaskan untuk melindungi dan memenuhi kualitas kehidupan masyarakat dalam mewujudkan kewajiban daerah. Semakin tinggi belanja, maka

pemerintah daerah akan lebih baik dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, dan sebaliknya jika semakin tinggi dalam tingkat pelayanan kepada masyarakat, maka akan tinggi juga kinerja pemerintah daerah.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Armaja, 2015) memberikan hasil kesimpulan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Aceh, tetapi berbanding terbalik dengan penelitian (Ariwibowo, 2015) yang menunjukkan bahwa ada pengaruh yang negatif dan signifikan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2013. Dengan begitu, pada penelitian tersebut telah ditemukan bukti yang berbeda yaitu terdapat tambahan variabel moderasi pada jurnal Ariwibowo. Selain itu periode dan tempat yang digunakan penelitian juga berbeda. Hal tersebut yang membuat ada perbedaan hasil penelitian belanja daerah terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pada jurnal pertama dilihat dari hasil nilai koefisien regresi linier berganda, sedangkan jurnal kedua dilihat dari hasil nilai uji hipotesis.

Transparansi dijadikan salah satu faktor penting dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah yang merupakan salah satu prinsip *good governance*. Hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah di sektor pemerintah yang dilakukan oleh (Purnama, 2016) menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, tetapi berbanding terbalik dengan penelitian (Nasution, 2018) yang menunjukkan bahwa secara parsial transparansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dengan begitu, pada penelitian tersebut telah ditemukan bukti yang berbeda yaitu terletak pada jenis penelitian, tempat penelitian, dan hasil uji hipotesis masing-masing jurnal yang menentukan berpengaruh atau tidak dan signifikan atau tidak serta nilainya bisa positif atau negatif, karena dapat menentukan apakah variabel independen tersebut mempengaruhi terhadap variabel dependen.

Penyerapan anggaran yaitu dimana menjadi salah satu tahapan dalam siklus anggaran yang akan dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Priagung et al., 2016) dalam penelitian menunjukkan bahwa penyerapan anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Banjarnegara, tetapi berbanding terbalik dengan penelitian (Arniwita et al., 2019) yang menunjukkan bahwa penyerapan anggaran belanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi Pemerintah Provinsi Jambi.

Diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai pembangunan daerah yang berimplikasi bagi pelayanan masyarakat. Bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD daerahnya guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Hasil pendapatan asli daerah ditunjukkan dari baik atau buruknya kinerja keuangan suatu daerah yang didapatkan atau ditentukan dari pendapatan yang diterima daerah.

Hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan kondisi keuangan daerah terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah di sektor pemerintah yang dilakukan

oleh (Andirfa, 2016) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh, tetapi berbanding terbalik dengan penelitian (Tahir et al., 2018) yang menunjukkan bahwa faktor pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Makassar. Dengan begitu, beberapa penelitian telah menemukan bukti yang berbeda yaitu data yang digunakan, jenis data, sumber data, tempat penelitian. Jurnal pertama dilihat dari hasil nilai koefisien pada analisis regresi linier berganda dan tidak menggunakan uji hipotesis, sedangkan jurnal kedua dilihat dari hasil nilai koefisien pada analisis regresi linier berganda dan nilai uji hipotesis.

Opini pemeriksaan audit adalah pernyataan oleh auditor mengenai laporan keuangan entitas yang diaudit. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan BPK yaitu opini audit yang sangat penting bagi masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja penyelenggaraan negara. Opini audit sering digunakan sebagai ukuran kinerja suatu daerah dalam mengelola keuangan eksternal.

Hasil penelitian (Parwanto, 2017) menunjukkan bahwa tidak semua hasil pemeriksaan BPK memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, tetapi berbanding terbalik dengan penelitian (Haristri, 2019) yang menunjukkan bahwa opini hasil pemeriksaan tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan begitu, beberapa penelitian telah menemukan bukti yang berbeda yaitu teknik pengambilan sampel penelitian, dan hasil nilai uji hipotesis. Pada jurnal pertama dari hasil kesimpulan nilai uji hipotesis yaitu salah satu masalah keagenan adalah asimetri dapat diatasi

dengan adanya pemberian opini oleh BPK terhadap laporan keuangan, sedangkan jurnal kedua dari hasil kesimpulan nilai uji hipotesis yaitu pemeriksaan yang dilakukan BPK lebih menekan pemeriksaan pada kewajaran laporan pemeriksaan berdasarkan sistem pengendalian internal, dan juga pemeriksaan akun-akun dan catatan akuntansi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menggabungkan penelitian (Armaja, 2015) dan (Tahir et al., 2018) dengan (Parwanto, 2017) yang merupakan 3 (tiga) variabel independen utama terhadap variabel dependen pada penelitian ini. Penelitian (Armaja, 2015) terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan belanja daerah sebagai variabel independen dan kinerja keuangan sebagai variabel dependen, sedangkan perbedaannya terletak pada variabel independen lainnya yaitu kekayaan daerah dan dana perimbangan serta perbedaan pada objek penelitian tersebut yaitu Kabupaten/Kota di Aceh. Penelitian (Tahir et al., 2018) memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel independen serta kinerja keuangan daerah sebagai variabel dependen, sedangkan perbedaannya yaitu dana perimbangan dan belanja modal sebagai variabel independen serta objek yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu kota Makassar. Penelitian (Parwanto, 2017) terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan opini pemeriksaan sebagai variabel independen dan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen, sedangkan perbedaannya yaitu temuan pemeriksaan BPK, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan serta objek penelitian tersebut yaitu di Provinsi Jawa Tengah.

Sementara itu, penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel independen tambahan yaitu perencanaan dan penganggaran, transparansi, dan penyerapan anggaran yang mengacu pada penelitian (Ariesmawati, 2020), (Purnama, 2016), dan (Arniwita et al., 2019). Pada ketiga penelitian tersebut sama-sama menggunakan kinerja keuangan daerah sebagai variabel dependen. Perbedaannya ketiga penelitian tersebut terletak pada variabel independen.

Dengan begitu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggabungkan ketiga variabel independen utama, menambahkan 3 (tiga) variabel independen lainnya. Penambahan variabel independen tersebut sesuai dengan dimensi pembentukan IPKD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Ketertarikan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah menggabungkan 6 (enam) dimensi IPKD yang ada dalam Permendagri tersebut menjadi satu kesatuan penelitian. Dari latar belakang tersebut saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *“Analisis Pengaruh Dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang”*.

1.2 Rumusan Masalah

Pengelolaan keuangan daerah mencakup semua hak dan kewajiban daerah dalam konteks pengelolaan suatu pemerintahan yang dapat dinilai dalam uang, termasuk semua bentuk aset terkait dengan hak dan kewajiban tersebut. Kewajiban daerah harus dikelola dalam kerangka sistem manajemen keuangan. Pengelolaan keuangan daerah meliputi keuangan daerah yang dikelola secara langsung dan aset

daerah yang terpisah. Keuangan yang dikelola secara langsung yaitu barang-barang inventaris APBD milik daerah, sedangkan aset daerah yang terpisah yaitu bisnis daerah seperti BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).

Kinerja suatu pemerintahan menunjukkan bagaimana pelaksanaan pemerintahan daerah sendiri berjalan, oleh karena itu sangat banyak untuk dilihat dan diukur. Kinerja merupakan gambaran dalam pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi. Indikator kinerja ukuran kuantitatif dan kualitatif dari yang digambarkan sesuai tingkat pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya, dengan mempertimbangkan indikator yang masuk, keluar, hasil, manfaat dan dampak.

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya terdapat perbedaan antara per dimensi IPKD terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Salah satunya dimensi opini BPK atas LKPD yang menyatakan tidak adanya berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Jadi, tidak semua menyatakan bahwa ada berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah serta dimensi IPKD banyak yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang?

2. Bagaimana pengaruh dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang?
3. Bagaimana pengaruh dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang?
4. Bagaimana pengaruh dimensi penyerapan anggaran terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang?
5. Bagaimana pengaruh dimensi kondisi keuangan daerah terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang?
6. Bagaimana pengaruh dimensi opini BPK atas LKPD terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.
2. Menganalisis pengaruh dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.
3. Menganalisis pengaruh dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.
4. Menganalisis pengaruh dimensi penyerapan anggaran terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

5. Menganalisis pengaruh dimensi kondisi keuangan daerah terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.
6. Menganalisis pengaruh dimensi opini Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini sebagaimana ingin mengetahui manfaat penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang terbagi menjadi dua kategori yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik dengan bidang kajian ini dalam Pengembangan Ilmu Ekonomi terutama pada Pengelolaan Keuangan Sektor Publik, dimana untuk penelitian ini akan membahas tentang Analisis Pengaruh Dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bukti dan juga dapat memberikan tambahan literatur untuk peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan pemahaman bagi penulis terutama pada penelitian yang berjudul “*Analisis Pengaruh Dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan*”

Daerah Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang”.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Semarang

Analisis Pengaruh Dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang ini dapat membantu untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang dari sisi dimensi IPKD.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dapat membantu sebagai referensi yang dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Hubungan keagenan adalah satu antara prinsipal dan agen dalam memeriksa pendelegasian kekuasaan pengambilan keputusan kepada agen. Sebagai agen, satu manajer memiliki tanggung jawab moral untuk memaksimalkan keuntungan pemilik, sementara yang lain berkepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri juga. Teori keagenan bisa diterapkan di sektor publik (Zelmiyanti, 2016).

Praktek pelaporan keuangan organisasi sektor publik termasuk landasan dari teori keagenan. Pemerintah berperan sebagai agen harus melihat bentuk tanggung jawab dalam memberikan informasi laporan keuangan bagi pengguna informasi. Dalam memberikan atau membuat keputusan yang baik pemerintah harus mampu melakukan secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Hubungan keagenan dapat dilihat dari suatu sistem pemerintah yang demokrasi yang memiliki hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah (Abdillah, 2019).

1. Pengaruh Keagenan dengan Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Dalam pemerintahan, legislasi secara implisit merupakan bentuk antara eksekutif, legislatif, dan publik. Peraturan tersebut mengatur semua kewajiban dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan. Anggaran daerah adalah

rencana keuangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut anggaran pendapatan dan belanja, untuk provinsi, kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran setelah undang-undang 22/1999 dengan melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui tim anggaran atau panitia (Zelmiyanti, 2016).

2. Pengaruh Keagenan dengan Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD

Konflik yang muncul karena manusia merupakan makhluk ekonomi yang memiliki sifat dasar kepentingan pribadi. Pemegang saham dan manajer memiliki tujuan berbeda dan setiap orang ingin tujuan mereka tercapai. Hal ini mengakibatkan munculnya konflik kepentingan. Pemegang saham menginginkan pengembalian investasi yang lebih cepat, sedangkan manajer ingin diperhitungkan dengan menawarkan kompensasi atau insentif yang memaksimal atas kinerjanya dalam mengelola. Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen masalah keagenan seperti kurangnya sinkronisasi dalam utilitas. Sebagai agen, manajer bertanggung jawab secara moral atas keuntungan pemilik, tetapi disisi lain mereka juga berkepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, ada kemungkinan kuat bahwa agen tidak selalu dalam kepentingan terbaik dari prinsipal (Riswan, 2014).

3. Pengaruh Keagenan dengan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam penerapannya melalui transparansi terhadap kinerja Pemerintah Daerah sesuai dengan teori keagenan. Teori keagenan merupakan teori yang digunakan untuk menganalisis pengaturan kontrak antara dua atau beberapa individu, kelompok organisasi. Teori keagenan adalah sebuah konsep yang

memberikan pengertian tentang konstituen yang memiliki orang lain sebagai agen yang menjalankan fungsinya, termasuk untuk dalam pengambilan keputusan. Teori ini dapat diterapkan dalam sektor publik sebagai pendelegasian publik kepada perwakilan di parlemen. Dengan menyampaikan laporan keuangan, pemerintah daerah sebagai pemilik informasi keuangan terkadang hanya bisa mendapatkan keuntungan sendiri tanpa mempertimbangkan dampaknya. Jadi ada kalanya pemerintah tidak memberikan laporan keuangan. Sehingga masyarakat tidak bisa memantau pejabat pemerintah terhadap keputusan yang diambil. Dalam upaya memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat ini dapat mengakibatkan adanya biaya keagenan yang harus ditanggung oleh pemerintah (Astuti, 2020).

4. Pengaruh Keagenan dengan Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran dari perspektif teori keagenan terjadi ketika satu atau beberapa orang mempekerjakan seseorang untuk memberikan layanan, kemudian mendelegasikan kekuasaan kepada agen. Prinsip utama teori ini menyatakan bahwa ada hubungan kerja antara pihak yang menerima wewenang yaitu manajer, pemisahan pemilik dan akuntan dalam literatur disebut teori keagenan. Teori ini adalah teori yang muncul sebagai salah satu dalam penelitian akuntansi yaitu variasi antara model keuangan dengan penambahan aspek manusia dalam model ekonomi. Teori keagenan menemukan adanya hubungan kontraktual antara pemilik dan manajemen dalam organisasi sektor publik sebagai pemilik dana dan manajer sebagai agen (Ramadhani, 2017).

5. Pengaruh Keagenan dengan Kondisi Keuangan Daerah

Teori yang memiliki hubungan karena ada ikatan suatu perjanjian dalam memberikan wewenang atau tugas yaitu hubungan pihak prinsipal dan pihak agen. Indonesia termasuk negara yang demokrasi sehingga memiliki hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah dengan masyarakat. Pemerintah Pusat bertugas dalam memberikan yang seharusnya dikerjakan dan dilakukan Pemerintah daerah sebaliknya juga Pemerintah Daerah harus melakukan tugasnya untuk masyarakat sehingga dapat mensejahterakan masyarakat yang semakin membaik (Anisa B. C., 2020).

6. Pengaruh Keagenan dengan Opini Badan Pemeriksaan Keuangan atas LKPD

Pihak eksekutif atau pemerintah sebagai agen, memiliki agen untuk membentuk pemerintahan yang transparan, untuk hadir dan mengungkapkan setiap pelaksanaan pemerintah kepada pihak prinsipal atau kepada publik. Salah satu masalah agensi adalah asimetri informasi. Pemerintah, asimetri informasi ini dapat menyebabkan penyimpangan atau korupsi di pihak pemerintah sebagai agen. Oleh karena itu, pengelolaan pemerintah harus diawasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah audit yang dilakukan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (Parwanto, 2017).

2.2 Variabel – Variabel Penelitian

2.2.1 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2020, IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai

kinerja tata kelola keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.

2.2.2 Dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Dimensi IPKD adalah suatu besaran yang terdiri dari indikator-indikator pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah. Pengukuran IPKD diukur berdasarkan dari 6 (enam) dimensi sesuai tahapan sebagai berikut:

1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (bobot 15%)

Perencanaan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menentukan tindakan masa depan yang sesuai, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, sehingga penting dilakukan sebelum melakukan suatu kegiatan/pekerjaan (Ramadhani, 2017).

Sedangkan penganggaran merupakan proses dalam melakukan persiapan menyusun rencana/anggaran keuangan, pendapatan serta pembiayaan, yang selanjutnya dana tersebut akan dialokasikan sesuai fungsi dan sasaran yang hendak dicapai (Ariesmawati, 2020).

Tahapan perencanaan dan penganggaran merupakan salah satu elemen dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah, untuk menjamin terlaksananya proses manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien. Tahapan tersebut diatur terpisah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pengaturan yang terpisah ini memunculkan masalah terlepas kaitan antara perencanaan dan penganggaran. Hal ini tercantum dalam penjelasan PP Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

(1) Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD

Penilaian terhadap kesesuaian program RPJMD dan RKPD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RPJMD dan RKPD.

(2) Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS

Penilaian terhadap kesesuaian program RKPD dan KUA-PPAS dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS.

(3) Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD

Penilaian terhadap kesesuaian program KUA-PPAS dan APBD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD.

(4) Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS

Penilaian terhadap kesesuaian jumlah pagu per program RKPD dan KUA-PPAS yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS.

(5) Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD

Penilaian terhadap kesesuaian jumlah pagu per program KUA-PPAS dan APBD yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD.

2. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD (bobot 20%)

Dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD merupakan salah satu dimensi yang diukur dalam IPKD. Indikator-indikator yang terdapat dimensi Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD merupakan beberapa amanat peraturan perundang-undangan. Indikator-indikator yang digunakan terdiri dari:

- (1) Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% (persen) dari APBD sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1).
 - (2) Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan sebesar minimal 10% (persen) dari APBD di luar gaji sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.
 - (3) Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer sebesar minimal 25% dari dana transfer umum sesuai Permendagri Nomor 39 Tahun 2020.
 - (4) Alokasi belanja untuk memenuhi standar pelayanan minimal sesuai dengan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018.
3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (bobot 15%)

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu dari yang paling penting faktor untuk dipertimbangkan dalam meningkatkan kapasitas dari pemerintah, karena merupakan salah satu dasar prinsip *good governance*. Transparansi merupakan toleransi pemerintahan dalam memberikan informasi tentang aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Purnama, 2016).

Wujud dari keterbukaannya informasi keuangan kepada masyarakat yaitu transparansi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, terbuka dan jujur memberikan informasi keuangan kepada masyarakat atas transparansi pengelolaan keuangan. Dengan berdasarkan adanya pertimbangan masyarakat mempunyai hak dalam hal terbukanya dan keseluruhan atas pertanggungjawaban pemerintah untuk mengelola sumber daya yang telah diberikan kepercayaan kepadanya dan kepatuhannya pada peraturan perundang-undang (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003).

Dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2020, mencakup indikator:

- (1) Ketepatan waktu penyajian. Nilai 1 diberikan jika informasi/dokumen pengelolaan keuangan daerah yang diukur telah tersedia atau disediakan dalam situs jaringan resmi pemerintah daerah atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam waktu paling lama 30 hari setelah ditetapkan, dan nilai 0 diberikan untuk kondisi sebaliknya.
- (2) Keteraksesan. Nilai 1 diberikan jika informasi/dokumen pengelolaan keuangan daerah yang diukur telah tersedia untuk diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui situs jaringan resmi pemerintah daerah atau Sistem Informasi Pemerintah daerah dan nilai 0 diberikan untuk kondisi sebaliknya.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengukuran indeks dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah perkalian skor rata-rata dengan bobot. Rumus indeks dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: Skor Rata-rata x Bobot

4. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)

Keterlambatan penyerapan anggaran ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah, terutama untuk jenis barang dan belanja modal (Elim et al., 2018).

Kemampuan penyerapan anggaran merupakan salah satu kriteria untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam pergerakan sebagai roda penggerak perekonomian dan merupakan salah satu dari indikator evaluasi kinerja yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017.

Masalah penyebab utama yang menjadi rendahnya penyerapan antara lain adalah lambatnya dalam pelaksanaan kegiatan di karena kompetensi sumber daya, perencanaan dan kehati-hatian para pengambil keputusan. Sementara itu, masalah dalam pelaksanaan anggaran adalah mekanisme pencairan yang lama (Arniwita et al., 2019).

Dimensi penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus APBD yang dimulai dari perencanaan anggaran, persetujuan bersama, evaluasi anggaran dan penetapan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya.

Indikator yang sesuai dengan struktur anggaran belanja dalam APBD meliputi penyerapan:

- (1) Anggaran belanja operasional merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka

pendek (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

- (2) Anggaran belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).
- (3) Anggaran belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).
- (4) Anggaran belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah).

5. Kondisi Keuangan Daerah (bobot 15%)

Kondisi keuangan diartikan sebagai kemampuan suatu organisasi untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Selama proses penyediaan barang dan jasa, organisasi tunduk pada kewajiban keuangan dalam bentuk biaya, pengeluaran atau hutang. Jika sebuah organisasi dapat membayar kewajiban/utang ini tanpa menyebabkan kesulitan keuangan yang besar, maka kami katakan bahwa kemampuan organisasi untuk membayar tinggi dan organisasi dalam kondisi keuangan yang baik (Suryani, 2016).

Kondisi keuangan suatu pemerintah merupakan kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban, mengantisipasi kejadian tak terduga dan menegakkan haknya secara efektif dan efisien (Leki, 2018).

Kondisi keuangan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, mencakup indikator sebagai berikut:

- (1) Kemandirian keuangan daerah adalah suatu kondisi pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri.

Rumus Kemandirian Keuangan:

$$\frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$$

- (2) Fleksibilitas keuangan merupakan suatu kondisi pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang (*debt capacity*).

Rumus Fleksibilitas Keuangan:

$$\frac{(\text{Total Pendapatan} - \text{DAK})}{(\text{Total Kewajiban} + \text{Belanja Pegawai})}$$

- (3) Solvabilitas operasional merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran.

Rumus Solvabilitas Operasional:

$$\frac{\text{Total Pendapatan LO} - \text{Pendapatan DAK LO}}{\text{Total Beban LO}}$$

- (4) Solvabilitas jangka pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 (dua belas) bulan.

Rumus Solvabilitas Jangka Pendek:

$$\frac{(Kas \text{ dan Setara Kas} + \text{Investasi Jk. Pendek})}{Kewajiban Lancar}$$

- (5) Solvabilitas jangka panjang merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang.

Rumus Solvabilitas Jangka Panjang:

$$\frac{\text{Total Aset Tetap}}{Kewajiban Jk. Panjang}$$

- (6) Solvabilitas layanan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat.

Rumus Solvabilitas Layanan:

$$\frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD (bobot 15%)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus memeriksa setiap tahunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam Pengelolaan Keuangan Negara di suatu daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan hasil pemeriksaan yang disusun serta disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secepatnya sesudah kegiatan pemeriksaan selesai. Adanya kegiatan pemeriksaan

keuangan tersebut dapat menghasilkan opini. Opini adalah sebuah pernyataan yang profesional tentang kewajaran informasi keuangan yang dilampirkan dalam laporan keuangan berdasarkan dengan beberapa kriteria, yaitu:

- (1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- (2) Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- (3) Kepatuhan pada peraturan undang-undang; dan
- (4) Efektivitas sistem pengendalian intern (I, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis opini berdasarkan BPK RI terhadap Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah:

- (1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion* yaitu penilaian tertinggi yang diberikan BPK, karena membuktikan bahwa laporan keuangan tersebut telah disampaikan secara wajar, tidak ditemukan kesalahan secara material, dan sesuai standar yang ada.
- (2) Opini Wajar Dengan Pengecualian atau *qualified opinion* merupakan laporan entitas yang diaudit dengan wajar dalam semua hal material, keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas sesuai dalam prinsip akuntansi umumnya yang diakui di Indonesia, kecuali akibat dari masalah-masalah ini yang dikecualikan.
- (3) Opini Tidak Wajar atau *adverse opinion* yaitu laporan keuangan yang diaudit tidak menyajikan sesuai wajar posisi keuangan, aktivitas operasi, dan arus kas dari suatu entitas secara prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- (4) Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) yaitu menunjukkan bahwa auditor tidak menyatakan dalam laporan, jika ruang lingkup audit yang dilakukan tidak cukup untuk membentuk opini.

2.2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005, pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Tujuan pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: 1) meningkatkan dan memperluas yang lokal ekonomi, 2) mengembangkan sebuah berkelanjutan, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, dan jangka panjang penggunaan lahan perencanaan sistem, 3) meningkat ketajaman di dalam proses dari mengklaim suatu negara kedaulatan, dan 4) membuat sebuah pokok tentang para negara ekonomi (Hidayat, 2015).

2.2.4 Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian dalam mengimplementasikan suatu kegiatan/program/dalam mencapai tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi sebagaimana tertuang dalam rumusan perencanaan suatu organisasi (Hidayat, 2015).

Kinerja keuangan yaitu ukuran kinerja dengan menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan terutama dilakukan untuk kinerja masa lalu dalam melaksanakan berbagai analisis untuk mendapatkan keadaan keuangan yang mewakili dari realitas entitas dan kinerja potensial yang akan dikejar. Analisis keuangan merupakan upaya untuk mengidentifikasi keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia (Zelmiyanti, 2016).

Salah satu tujuan ditetapkanya Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 adalah untuk mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu, melalui pengukuran IPKD dengan hasil skala nilai 1 – 100. Setelah pemerintah daerah mengetahui nilai IPKD pada periode tertentu, diharapkan dapat memicu dan memotivasi dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah periode berikutnya.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Saraswati, 2018)	Efisiensi dan Efektivitas Manajemen Keuangan Daerah	Variabel Independen: – Pengelolaan keuangan publik – Efisiensi DEA – Efektivitas Variabel Dependen: – Laporan keuangan daerah	1. Efisiensi beberapa daerah masih relatif rendah, sehingga diperlukan peningkatan efisiensi, terutama dalam belanja infrastruktur. 2. Kinerja efektivitas menunjukkan bahwa kerangka peraturan

				merupakan kinerja yang tertinggi.
2.	(Zelmiyanti, 2016)	Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemandirian daerah - Rasio efektivitas - SILPA - Pertumbuhan PAD <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Modal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemandirian daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal. 2. Rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap belanja modal. 3. SILPA tidak berpengaruh terhadap belanja modal. 4. Pertumbuhan PAD berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal.
3.	(Abdillah, 2019)	Hubungan Budaya Etis, Ketaatan Aturan Akuntansi, Penegak Peraturan, Komitmen Organisasi Terhadap Frekuensi Kecurangan Pada Sektor Pemerintah Desa (Studi Kasus Pemerintah Kecamatan Sayung Demak)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budaya etis - Ketaatan pada aturan akuntansi - Penegak peraturan - Komitmen organisasi <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecenderungan kecurangan pada sektor pemerintah daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budaya etis organisasi diperoleh memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 2. Ketaatan peraturan akuntansi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 3. Penegakan peraturan hukum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan

				kecurangan akuntansi (<i>fraud</i>). 4. Komitmen organisasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (<i>fraud</i>).
4.	(Riswan, 2014)	Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan	Variabel Independen: – Kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian keuangan daerah; rasio efektivitas keuangan daerah; dan rasio efisiensi keuangan daerah) Variabel Dependen: – Belanja modal untuk pelayanan publik	Kinerja keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal untuk pelayanan publik pada pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera.
5.	(Astuti, 2020)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Via Website (Studi Empiris Keuangan Pada pemerintahan Daerah Di Jawa Timur Periode 2018)	Variabel Independen: – Jumlah penduduk – Belanja daerah – Pendapatan asli daerah Variabel Dependen: – Akses laporan keuangan pemerintah melalui internet/website	Hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, belanja daerah dan pendapatan asli daerah menunjukkan nilai t-statistik . 0,05 sehingga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akses laporan keuangan pemerintah melalui internet/website.

				Sedangkan secara simultan, dengan berdasarkan pada F-statistik 0,93 menjadi gambaran bahwa masih banyak variabel lain yang mempengaruhi akses informasi laporan keuangan pemerintah daerah via website.
6.	(Ramadhani, 2017)	Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten	Variabel Independen: – Perencanaan anggaran – Kualitas sumber daya manusia – Pelaksanaan anggaran Variabel Dependen: – Penyerapan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pengaruh Positif dan Signifikan perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten. 2. Terdapat pengaruh Positif dan Signifikan kualitas sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten. 3. Terdapat pengaruh Positif dan Signifikan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten.
7.	(Purnama, 2016)	Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Dan Transparansi	Variabel Independen: – Pengawasan keuangan daerah – Akuntabilitas pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah secara bersama-

		<p>Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya</p>	<p>keuangan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transparansi pengelolaan keuangan daerah <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinerja pemerintah daerah 	<p>sama berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.</p> <p>2. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan semakin baik tingkat pengawasan keuangan daerah maka akan semakin baik pula kinerja pemerintah daerah.</p> <p>3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah.</p> <p>4. Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan semakin transparan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan maka</p>
--	--	--	---	--

				akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah.
8.	(Elim et al., 2018)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Kupang	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan anggaran - Pelaksanaan anggaran - Pengadaan barang jasa - Komitmen manajemen - Lingkungan birokrasi <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyerapan anggaran 	Menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun parsial perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan pendapatan dan belanja pada OPD di Kota Kupang.
9.	(Arniwita et al., 2019)	Dampak Penyerapan Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus di Provinsi Jambi)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serapan anggaran belanja SKPD <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinerja instansi pemerintah Provinsi Jambi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil analisis kecenderungan serapan anggaran belanja SKPD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 secara umum mengalami keterlambatan. 2. Perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran merupakan faktor yang mempengaruhi serapan anggaran belanja secara signifikan sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan. 3. Serapan anggaran belanja berpengaruh positif dan

				signifikan terhadap kinerja instansi Pemerintah Provinsi Jambi.
10.	(Suryani, 2016)	Analisis Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh dan Di Sumatera Utara	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> - Analisis rasio - Kondisi keuangan daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten/Kota di Aceh memiliki tingkat kondisi kondisi keuangan daerah yang lebih baik daripada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara atas rasio total pendapatan daerah/ jumlah penduduk, rasio pajak daerah dan retribusi daerah/ PDRB, dan rasio SILPA tahun sebelumnya/ belanja daerah. 2. Kabupaten/Kota di Sumatera Utara memiliki tingkat kondisi keuangan daerah yang lebih baik daripada Kabupaten/Kota di Aceh atas rasio belanja modal/ total belanja daerah.
11.	(Leki, 2018)	Analisis Indeks Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah provinsi Aceh Tahun 2015-2017	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah daerah - Keuangan negara - Solvabilitas jangka pendek - Solvabilitas jangka panjang - Solvabilitas anggaran - Fleksibilitas keuangan 	Menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun keuangan nilai indeks terbaik adalah Sabang (0,488), Banda Aceh (0,452), Aceh Tengah (0,444), Aceh Besar (0,389), dan Gayo Lues (0,382). Sedangkan pemerintah dengan nilai kondisi keuangan terendah atau kategori ranking adalah Aceh Tenggara (0,177),

			<ul style="list-style-type: none"> - Kemandirian keuangan - Layanan solvabilitas - Solvabilitas - Solvabilitas operasi. 	Aceh Singkil (0,148), dan Lhokseumawe (0,106).
12.	(Hidayat, 2015)	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan keuangan daerah - Sistem akuntansi keuangan daerah <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinerja pemerintah daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada instansi pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman. 2. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada instansi pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman.
13.	(Tahir et al., 2018)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Makassar	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Dana perimbangan - Belanja modal <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinerja keuangan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. 2. Faktor dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Makassar. 3. Faktor belanja modal berpengaruh positif dan

				signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Makassar.
14.	(Ariesmawati, 2020)	Pengaruh Perencanaan dan Penganggaran terhadap Kinerja Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur	Variabel Independen: – Perencanaan – Penganggaran Variabel Dependen: – Kinerja perangkat daerah	1. Perencanaan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja perangkat daerah pada Bappeda Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. 2. Penganggaran juga mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja perangkat daerah pada Bappeda Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. 3. Pengaruh perencanaan dan penganggaran terhadap kinerja mempunyai pengaruh sebesar 66,7%. Sedangkan sisanya sebesar 33,3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian ini.
15.	(Armaja, 2015)	Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap	Variabel Independen: – Kekayaan daerah – Dana perimbangan	1. Kekayaan daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan

		Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh)	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja daerah Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> - Kinerja keuangan 	Kabupaten/Kota di Aceh. <ol style="list-style-type: none"> 2. Kekayaan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Aceh. 3. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Aceh. 4. Belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Aceh.
16.	(Ariwibowo, 2015)	Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Moderasi	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> - Dana perimbangan - Belanja daerah - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> - Kinerja keuangan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada pengaruh yang negatif dan signifikan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2013. 2. Ada pengaruh yang negatif dan signifikan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2013. 3. pengaruh yang negatif dan signifikan pendapatan asli daerah terhadap

				<p>kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2013.</p> <p>4. Pendapatan asli daerah memoderasi pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2013, terbukti kebenarannya.</p> <p>5. Pendapatan asli daerah memoderasi pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2013, terbukti kebenarannya.</p>
17.	(Nasution, 2018)	<p>Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan keuangan daerah - Akuntabilitas - Transparansi <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinerja keuangan daerah 	<p>1. Secara parsial pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>2. Secara parsial transparansi berpengaruh negatif dan</p>

				signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
18.	(Priagung et al., 2016)	Pengaruh Penyerapan Anggaran, Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja Dan Pengawasan Inspektorat Terhadap Kinerja Keuangan Organisasi Publik (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara)	Variabel Independen: – Penyerapan anggaran – Budaya organisasi – Kepuasan kerja – Pengawasan inspektorat Variabel Dependen: – Kinerja keuangan organisasi publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Banjarnegara. 2. Budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Banjarnegara. 3. Kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Banjarnegara. 4. Pengawasan inspektorat berpengaruh terhadap kinerja keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Banjarnegara.
19.	(Andirfa, 2016)	Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja	Variabel Independen: – Belanja modal – Dana perimbangan – Pendapatan asli daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja modal secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.

		Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh	Variabel Dependen: – Kinerja keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 2. Dana perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. 3. Pendapatan asli daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.
20.	(Parwanto, 2017)	Pengaruh Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Opini pemeriksaan – Temuan pemeriksaan BPK – Tindak lanjut hasil pemeriksaan – Ketepatan Waktu penyampaian laporan keuangan <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kinerja keuangan pemerintah daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak semua hasil pemeriksaan BPK memiliki Pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 2. Opini pemeriksaan dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. 3. Temuan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, ini menunjukkan bahwa nilai temuan yang rendah dan tingkat

				tindak lanjut hasil pemeriksaan yang rendah tidak dapat menggambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah tersebut rendah.
21.	(Haristri, 2019)	Pengaruh hasil Pemeriksaan BPK RI Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Tengah	Variabel Independen: – Opini audit – Temuan audit – Tidak lanjut hasil pemeriksaan Variabel Dependen: – Kinerja keuangan	<p>1. Opini pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, karena pemeriksaan yang dilakukan BPK dilakukan lebih menekankan pemeriksaan pada kewajaran laporan keuangan pemerintah berdasarkan sistem pengendalian internal, dan juga pemeriksaan akun-akun dan catatan akuntansi.</p> <p>2. Temuan pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah dengan temuan besar belum tentu memiliki kinerja keuangan yang buruk begitu pula sebaliknya.</p> <p>3. Tidak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, karena tindak</p>

				<p>lanjut atas rekomendasi diperlukan untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.</p>
--	--	--	--	--

Sumber: Jurnal-jurnal penelitian terdahulu

2.4 Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Pemikiran

2.4.1 Pengaruh Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang

Tahun 1999 mulai diterapkannya otonomi daerah yang menjadikan teori keagenan di pemerintah dimulai. Penerapan teori keagenan yang dapat dipelajari dari dua perspektif yaitu hubungan antara eksekutif dan legislatif, serta legislatif dengan rakyat, berupa implikasinya mungkin positif dalam bentuk efisiensi, selain itu lebih banyak berupa hal-hal negatif seperti dalam bentuk perilaku oportunistik. Oleh karena itu, hal ini terjadi pihak agen lebih memiliki keunggulan dalam memberikan informasi keuangan daripada pihak prinsipal, sedangkan pihak prinsipal hanya boleh memanfaatkan kepentingan pribadinya karena cuman memiliki keunggulan kekuasaan. Permasalah keagenan timbul ketika eksekutif berkeinginan untuk memaksimalkan seluruh kepentingan mereka mulai dari proses

penganggaran dan pembuatan pengambilan keputusan hingga menghadirkan kewajaran pada laporan keuangan untuk menunjukkan bahwa kinerja yang selama ini sudah membaik, selain dari itu dalam mempertahankan keamanan posisinya dari legislatif dan rakyat (Novianti, 2017).

Perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan sesuatu tindakan di masa depan yang sesuai urutan pilihan dengan diperhitungkan sumber daya yang tersedia (Ramdhani & Anisa, 2017). Sedangkan penganggaran adalah proses dalam melakukan persiapan menyusun rencana/anggaran keuangan, pendapatan serta pembiayaan, yang selanjutnya dana tersebut akan dialokasikan sesuai fungsi dan sasaran yang hendak dicapai (Ariesmawati, 2020).

Hasil penelitian (Ariesmawati, 2020) menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja perangkat daerah pada Bappeda Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan didukung oleh para penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran ada pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang

2.4.2 Pengaruh Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang

Pada teori keagenan memiliki hubungan antara dua pihak yaitu pemerintah

daerah sebagai pihak agen dan masyarakat sebagai pihak prinsipal yang disepakati oleh suatu perjanjian sejak awal. Pihak yang dapat memberikan informasi keuangan disebut pihak agen, sedangkan yang menerima informasi keuangan disebut prinsipal. Indonesia termasuk negara demokratis yang memiliki hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta pemerintah daerah dengan masyarakat. Tugas yang diberikan pemerintah pusat harus dilaksanakan pemerintah daerah kepada masyarakat. Agar dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat lebih membaik (Anisa B. C., 2020).

Salah satu dimensi yang diukur oleh IPKD adalah dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD. Indikator-indikator di dalam dimensi tersebut termasuk beberapa amanat peraturan perundang-undangan. PSAP No. 2, ayat 7, menyatakan bahwa belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari negara/rekening perbendaharaan daerah yang mengurangi surplus perimbangan anggaran untuk periode tahun anggaran yang bersangkutan dan yang tidak akan diganti oleh pemerintah (Armaja, 2015). Menurut Undang-undang No. 32/2004 Pasal 167, ayat 1 pengeluaran daerah adalah untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Hasil penelitian (Armaja, 2015) menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Aceh dan penelitian yang dilakukan oleh (Garini, 2015) juga sama menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan didukung oleh para penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang

2.4.3 Pengaruh Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang

Sasaran dari teori keagenan tidak hanya di ruang lingkup organisasi sektor swasta melainkan juga pada sektor publik, khususnya pemerintahan. Pada teori keagenan untuk sektor publik, pemerintah sebagai agen yang bisa berbuat sesuai kepentingan mereka sendiri dikarenakan yang memiliki informasi lebih banyak. Dengan begitu, pemerintah dituntut secara transparan kepada masyarakat sebagai prinsipal. Masalah keagenan disini adalah ketidakmampuan pemerintah dalam optimalisasikan kepentingan masyarakat banyak. Masalah tersebut bisa muncul diakibatkan adanya konflik kepentingan maupun asimetri informasi. Agar hal yang dilakukan dapat mengurangi terjadi asimetri informasi yaitu harus melakukan penjelasan atas informasi ada dalam laporan keuangan untuk mengendalikan perilaku dan menyesuaikan tujuan pemerintah dan masyarakat. Masyarakat berkeinginan menjaga transparansi pemerintah di antara masyarakat, dengan begitu ada penjelasan informasi yang membuat masyarakat percaya sebagai prinsipal kepada pemerintah sebagai agen (Wulandari, 2019).

Transparansi dapat diartikan sebagai suatu aturan yang membentuk dan mengupayakan pelaporan, kebijakan-kebijakan yang relevan, informasi lebih mudah diakses dan kredibel. Transparansi meningkatkan aktivitas suatu informasi tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya secara akurat serta tepat

waktu (Sriwijayanti, 2018). Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah faktor penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah untuk menyediakan terkait dengan kegiatan pengelolaan dari sumber daya publik kepada mereka yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan lain yang digunakan oleh pihak-pihak pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Dalam hal suatu keputusan diperlukan informasi akuntansi, yang terpenting adalah laporan keuangan (Purnama, 2016).

Hasil penelitian (Purnama, 2016) menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dan penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2020) menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan didukung oleh para penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang

2.4.4 Pengaruh Dimensi Penyerapan Anggaran Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang

Penyerapan anggaran erat kaitannya dengan teori keagenan, yang mana merupakan teori yang menjelaskan hubungan satu atau lebih dalam mempekerjakan orang lain kekuasaan dalam mengambil keputusan. Hubungan teori keagenan yang mendasari hubungan kontrak antara pemilik dan manajemen dalam suatu organisasi perangkat daerah sebagai agen sedangkan bupati menjadi prinsipal. Pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih yaitu salah satu hal untuk

mendukung proses pelaksanaan anggaran dan belanja daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya perlu adanya mekanisme sistem dalam proses pengelolaan dana masyarakat agar tidak terjadi masalah yang akan muncul sewaktu-waktu (Saifulloh, 2020).

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dalam siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran, dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran (Priagung et al., 2016). Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Penyerapan anggaran melihat keahlian pemerintah daerah dalam melakukan dengan baik dan mempertanggungjawabkan setiap kali kegiatan yang memiliki akumulasi penyerapan anggaran yang dilakukan oleh SKPD. Untuk mengukur penyerapan tidak cukup dengan membandingkan dana yang tersedia dengan pengeluaran yang sebenarnya. Penyerapan anggaran yang memiliki tanggung jawab dengan memperhatikan prinsip *value for money* adalah salah satu implementasi praktek *governance* dan merupakan ukuran kinerja pemerintah (Ramadhani, 2017).

Hasil penelitian (Priagung et al., 2016) menunjukkan bahwa penyerapan anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Banjarnegara dan penelitian yang dilakukan oleh (Arniwita et al., 2019) menunjukkan bahwa penyerapan anggaran belanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi Pemerintah Provinsi Jambi. Berdasarkan didukung oleh para penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Penyerapan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang

2.4.5 Pengaruh Dimensi Kondisi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu dasar penyelenggaraan pelayanan publik dalam rencana keuangan. Di Indonesia dokumen anggaran daerah sering disebut dengan APBD untuk entitas provinsi atau kabupaten dan kota. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat dalam anggaran sebelum penyusunan APBD akan dilakukan, dibuat kesepakatan dahulu antara eksekutif dan legislatif mengenai orientasi umum dan kebijakan preferensi anggaran yang akan digunakan sebagai pedoman dalam APBD. Pedoman yang disusun eksekutif tersebut akan diserahkan kepada legislatif untuk ditinjau dan diskusikan bersama-sama sebelum dijadikan peraturan daerah (Al-Latief, 2018).

Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) adalah kemampuan keuangan Pemda untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga dan mengeksekusi hak keuangannya secara efektif dan efisien (Maizunati, 2017). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan atau pemasukan dari daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang didapatkan sesuai peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku. Kesimpulan Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendanaan dari masyarakat lokal selama setahun dapat digunakan sebagai biaya pengeluaran rutin dan pembangunan infrastruktur daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Andirfa et al., 2016).

Hasil penelitian (Leki, 2018) menunjukkan bahwa kondisi keuangan daerah dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Halmahera Barat

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Halmahera Barat dan penelitian yang dilakukan oleh (Tahir et al., 2018) menunjukkan bahwa faktor pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Makassar. Berdasarkan didukung oleh para penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Kondisi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang

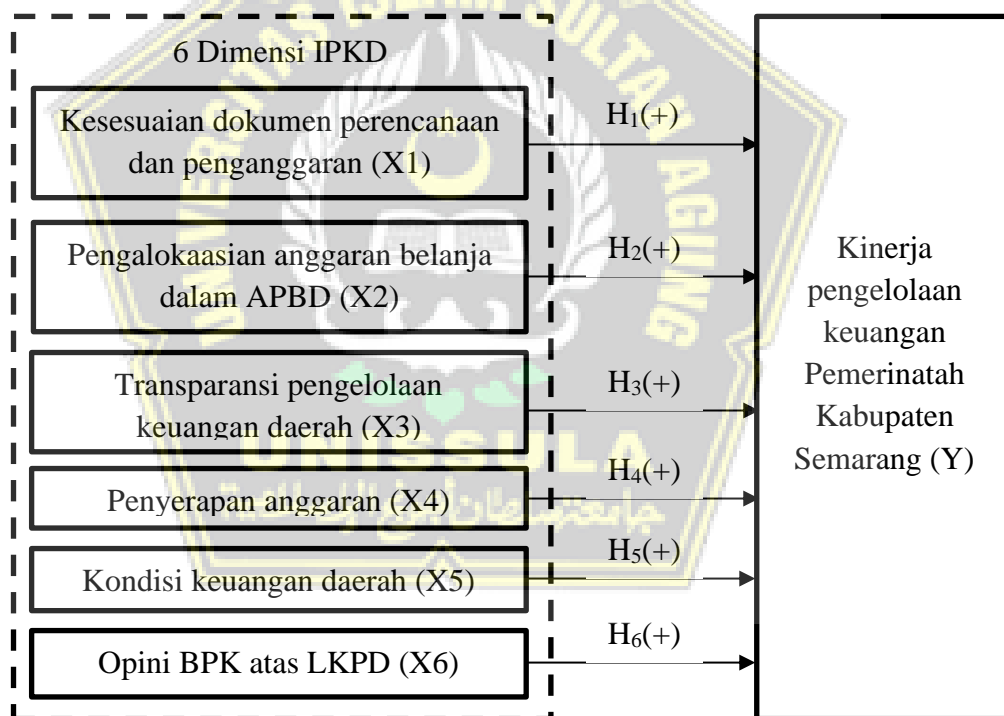
2.4.6 Pengaruh Dimensi Opini BPK Atas LKPD Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang

Teori keagenan menunjukkan bahwa akan ada kepentingan antara agen dan prinsipal. Agen dengan sesuai hal ini merupakan pemerintah daerah dan sedangkan prinsipal merupakan masyarakat yang mewakili yaitu DPRD. Sesuai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, negara sebagai prinsipal menunjuk BPK untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah, sehingga mendapatkan keyakinan atas kebenaran laporan keuangan yang disusun dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, hasil pemeriksaan keuangan BPK adalah opini pemeriksaan merupakan alat ukur penilaian kinerja pengelolaan keuangan negara yang sangat penting bagi masyarakat. Pengukuran kinerja suatu daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah bersifat eksternal yaitu opini pemeriksaan yang sering digunakan (Parwanto, 2017).

Hasil penelitian (Parwanto, 2017) menunjukkan bahwa tidak semua hasil pemeriksaan BPK berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dan penelitian yang dilakukan oleh (Pradnyani, 2020) menunjukkan bahwa opini audit BPK berpengaruh positif pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2013-2017. Berdasarkan didukung oleh para penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆: Opini BPK atas LKPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang

2.5 Kerangka Penelitian



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.3 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang yang ada, jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan fenomena atau populasi tertentu yang didapat dari subjek beberapa individu, organisasi atau perspektif (Surastowo, 2019). Sedangkan menurut (Sugiyono, 2015), Pendekatan Kuantitatif adalah sebuah penelitian yang sesuai fenomena yang ada dalam penelitian suatu populasi berdasarkan cara tertentu dengan analisis data yang bersifat statistik.

Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif adalah data yang didapatkan sesuai fenomena atau populasi sampel penelitian yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode statistik (Surastowo, 2019). Penelitian deskriptif ini berfokus pada penelitian untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh dimensi indeks pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang?

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan semua objek atau subjek yang terdapat di dalam wilayah tersebut dan populasi juga bukan hanya terdiri dari makhluk hidup di suatu wilayah bahkan juga mencakup semua objek di dalamnya (Baharani R. Y., 2020).

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan populasi adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang dan yang digunakan sebagai populasi penelitian ini adalah pejabat yang sudah terdaftar pada struktur organisasi masing-masing OPD. Dari jumlah populasi seluruh pejabat di Organisasi Perangkat Daerah masing-masing tersebut, kemudian akan diambil populasi sesuai kriteria-kriteria sampel yang sudah ditentukan dalam penelitian ini. Jumlah keseluruhan populasi dari semua OPD adalah 575 orang. Selanjutnya yang akan dijadikan populasi dalam penelitian tersebut adalah 91 orang dari jumlah keseluruhan populasi. Sebagai berikut adalah tabel rincian populasi penelitian yang sesuai dengan kriteria-kriteria sampel:

Tabel 3.1
Rincian Populasi Penelitian

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Semarang	Jumlah
Sekretariat:	
1. Sekretariat Daerah	-
2. Sekretariat DPRD	5 orang
Badan:	
1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda)	17 orang
2. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	1 orang
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
4. BLU RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo	1 orang
5. BLU RSUD dr. Gondo Suwarno	1 orang
6. Badan Keuangan Daerah (BKUD)	21 orang
Dinas:	
1. Inspektorat	1 orang
2. Satpol PP dan Damkar	-
3. Dinas Arsip dan PERPUSDA	1 orang
4. Dinas Lingkungan Hidup	1 orang
5. Dinas Sosial	1 orang
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 orang

7. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	2 orang
8. Dinas Kesehatan	1 orang
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	1 orang
10. DPMPTSP	1 orang
11. DISPERMADES	1 orang
12. Dinas Pekerjaan Umum (DPU)	2 orang
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 orang
14. Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan	2 orang
15. Dinas Perhubungan	1 orang
16. Dinas Komunikasi dan Informatika	8 orang
17. Dinas Pariwisata	1 orang
18. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP)	2 orang
Kantor:	
1. KESBANGPOL	-
Kecamatan:	
1. Ambarawa	1 orang
2. Bancak	1 orang
3. Bandungan	1 orang
4. Banyubiru	1 orang
5. Bawen	1 orang
6. Bergas	1 orang
7. Bringin	1 orang
8. Getasan	1 orang
9. Jambu	1 orang
10. Kaliwungu	-
11. Pabelan	-
12. Pringapus	1 orang
13. Sumowono	1 orang
14. Suruh	1 orang
15. Susukan	1 orang
16. Tengeran	1 orang
17. Tuntang	1 orang
18. Ungaran Barat	1 orang
19. Ungaran Timur	1 orang
TOTAL	91 orang

Sumber: Data populasi dari <https://main.semarangkab.go.id/perangkat-daerah/>

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari sejumlah unit yang dimiliki populasi yang akan digunakan penelitian, karena populasi memiliki jumlah yang banyak, maka sampel yang diambil untuk penelitian hanya sebagian dari populasi penelitian (Baharani R. Y., 2020). Dalam penelitian ini menggunakan teknik *sampling* yaitu *Sampling Purposive*. Menurut (Sugiyono., 2013), *Sampling Purposive* adalah teknik pengambilan sampel meliputi pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Dalam penelitian ini diambil sampel minimal 73 orang dari jumlah populasi yang digunakan yaitu 91 orang. Sampel minimal tersebut menggunakan TABLE 1 table for determining sample size from a given population. TABLE 1 tersebut berlaku digunakan untuk semua populasi yang ditentukan (Krejcie, 1970). Sebagai berikut gambar untuk tabel sampel minimal dalam penelitian ini:

TABLE 1
Table for Determining Sample Size from a Given Population

<i>N</i>	<i>S</i>	<i>N</i>	<i>S</i>	<i>N</i>	<i>S</i>
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	100000	384

Note.—*N* is population size.
S is sample size.

Gambar 3.1

TABEL 1 (Table for Determining Sample Size from a Given Population)

Kemudian disesuaikan dengan kriteria-kriteria sampel yang sudah ditentukan dalam penelitian ini. Sebagai berikut tabel kriteria sampel penelitian ini:

Tabel 3.2
Kriteria Sampel

1. Sekretaris Badan
2. Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan/Perencanaan/Keuangan/Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Subbag Perencanaan/Keuangan/Perencanaan dan Keuangan
4. Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah/Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia/Perencanaan Ekonomi dan Prasarana Wilayah/Penelitian dan Pengendalian/Anggaran/Pendapatan/Pajak Daerah/Perbendaharaan/Pengelolaan Aset Daerah/Komunikasi dan Informasi Publik/Aplikasi dan Informatika
5. Kasubid. Kebijakan Perencanaan/Kebijakan Penganggaran/Evaluasi dan Pelaporan/Pemerintahan/Sosial/Prasarana Wilayah/Pertanian dan Sumber Daya Alam/Pengembangan Usaha/ Litbang Pemerintahan dan Sosial/Litbang Ekonomi dan Prasarana wilayah/Perencanaan Anggaran/Penyusunan Anggaran/Evaluasi Pendapatan/Pendaftaran dan Pendataan/Perhitungan dan Penetapan/Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran/Pengendalian Anggaran/Pengelolaan Kas Daerah/Akuntansi/Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah/Inventarisasi dan Evaluasi/Pemeliharaan dan Pemberdayaan/Perencanaan dan Keuangan
6. Subbid. Perencanaan Anggaran/Penyusunan Anggaran/Perencanaan Pendapatan/Evaluasi Pendapatan/Pengendalian Anggaran/Pengelolaan Kas Daerah/Akuntansi/Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah
7. Kasi. Komunikasi Publik/Informasi Publik/Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi/Pengelolaan E-Government dan Aplikasi

3.3 Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber-sumber asli yang tidak berhubungan dengan media perantara. Pada penelitian ini data primer dilakukan melalui kuesioner yang akan dijawab oleh responden. Sumber data yang diperoleh secara langsung dari responden yang menjadi objek

penelitian yaitu seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang pada website <https://main.semarangkab.go.id/perangkat-daerah/>

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Metode Survey melalui Kuesioner

Metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari suatu tempat yang sesungguhnya dengan melakukan pengumpulan data melalui mengedarkan kuesioner. Survey adalah penelitian dengan mengambil salah satu sampel dari populasi penelitian yang dijadikan tempat untuk kuesioner sebagai alat pengumpulan data penelitian ini (Ariesmawati, 2020), sedangkan menurut (Sukmawati & Nurfitriani, 2019) menyatakan bahwa survey adalah komunikasi dengan responden digunakan sebagai cara pengumpulan data untuk mendapatkan sumber informasi tentang variabel-variabel penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang meliputi seluruh pertanyaan dan pertanyaan yang akan digunakan untuk memperoleh data, baik yang dilakukan melalui telepon, surat atau bertemu secara langsung.

Daftar pertanyaan tersebut harus sesuai dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Pertanyaan-pertanyaan yang disajikan dengan menggunakan skala *likert* yaitu skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang objek atau fenomena tertentu (Siregar, 2016). Peneliti menggunakan 7 poin dalam penilaian dengan kriteria dari sangat tidak setuju

sampai pada sangat setuju dengan menggunakan nilai besaran 1 sampai dengan 7 sebagai alternatifnya, adapun interpretasi skornya adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| a. Sangat Tidak Setuju (STS) | dengan skor = 1 |
| b. Tidak Setuju (TS) | dengan skor = 2 |
| c. Cukup Tidak Setuju (CTS) | dengan skor = 3 |
| d. Netral (N) | dengan skor = 4 |
| e. Cukup Setuju (CS) | dengan skor = 5 |
| f. Setuju (S) | dengan skor = 6 |
| g. Sangat Setuju (SS) | dengan skor = 7 |

Penelitian ini menggunakan skala *likert* 7 poin yang mengacu pada penelitian (Mutiasari, 2018) yang sama juga menggunakan skala 7 poin. Sebagai berikut merupakan 4 (empat) alasan yang digunakan untuk skala *likert* 7 poin pada penelitian ini:

1. Skala 7 poin ini yang sering digunakan selain skala 5 poin.
2. Dapat mengurangi kesalahan pengukuran dan lebih dalam memberikan nilai yang hampir sama saat melakukan pengukuran.
3. Dapat memberikan responden pilihan yang lebih banyak dan meningkatkan jumlah pendapat.
4. Pemilihan kategori dalam kuesioner akan menjadi lebih spesifik.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-data yang akan digunakan buat penelitian tersebut untuk dihimpun dan dianalisis seperti dokumen tertulis melalui jurnal diperoleh dari beberapa penelitian terdahulu

yang digunakan untuk mendukung penelitian tersebut, buku sebagai literatur referensi dalam mendukung penelitian tersebut (Surastowo, 2019).

3.5 Variabel, Definisi Operasional dan Indikator

3.5.1 Variabel

1. Variabel Independen atau Bebas

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel terkait (Baharani R. Y., 2020). Variabel independen pada penelitian ini yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (X1), pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (X2), transparansi pengelolaan keuangan daerah (X3), penyerapan anggaran (X4), kondisi keuangan daerah (X5), dan opini BPK atas LKPD (X6).

2. Variabel Dependen atau Terikat

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel terikat yang dipengaruhi karena adanya variabel independen atau variabel bebas (Baharani R. Y., 2020). Variabel dependen pada penelitian ini yaitu kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Semarang (Y).

3.5.2 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Tabel 3.3

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Kesesuaian dokumen	Perencanaan yaitu proses untuk melakukan	1. Dokumen RPJMD	<i>Skala Likert:</i> 1. STS

<p>perencanaan dan penganggaran (X1)</p>	<p>tindakan masa depan sesuai, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, sehingga penting dilakukan sebelum melakukan suatu kegiatan/pekerjaan. Penganggaran adalah proses dalam melakukan persiapan menyusun rencana/anggaran keuangan, pendapatan serta pembiayaan, yang selanjutnya dana tersebut akan dialokasikan sesuai fungsi dan sasaran hendak dicapai.</p>	<p>2. RKPD yang terukur 3. Dokumen KUA berdasarkan dokumen RKPD 4. Anggaran yang disiapkan 5. KUA-PPAS 6. Pengesahan APBD</p> <p>(Krestawan, 2015)&(Yuliani, 2020)</p>	<p>2. TS 3. CTS 4. N 5. CS 6. S 7. SS</p>
<p>Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (X2)</p>	<p>Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari negara/rekening perbendaharaan daerah yang mengurangi surplus perimbangan anggaran untuk periode tahun anggaran yang bersangkutan dan yang tidak akan diganti oleh pemerintah.</p>	<p>1. Belanja daerah memiliki peran penting 2. Belanja daerah yang tinggi 3. Kewajiban pemerintah daerah 4. Urusan pendanaan pemerintah 5. Amanat peraturan perundang-undang 6. Belanja daerah meliputi</p> <p>(Armaja, Ibrahim, R., 2015)&(Ariwibowo, 2015)</p>	<p><i>Skala Likert:</i> 1. STS 2. TS 3. CTS 4. N 5. CS 6. S 7. SS</p>
<p>Transparansi pengelolaan keuangan daerah (X3)</p>	<p>Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu dari yang paling penting faktor untuk dipertimbangkan dalam</p>	<p>1. Penyedia informasi yang mudah dan jelas</p>	<p><i>Skala Likert:</i> 1. STS 2. TS 3. CTS 4. N 5. CS</p>

	meningkatkan kapasitas dari pemerintah, karena merupakan salah satu dasar prinsip <i>good governance</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 2. Komunikasi publik oleh pemerintah. 3. Kemudahan akses informasi 4. Hak terhadap akses informasi 5. Menyusun suatu mekanisme pengaduan 6. Meningkatnya informasi melalui kerjasama dengan media massa dengan non instansi pemerintahan <p>(Purnama F. &., 2016)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 6. S 7. SS
Penyerapan anggaran (X4)	penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus APBD yang dimulai dari perencanaan anggaran, persetujuan bersama, evaluasi anggaran dan penetapan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi anggaran 2. Konsistensi pelaksanaan program <p>(Yuliani, 2020)& (IQBAL, 2018)</p>	<p><i>Skala Likert:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. STS 2. TS 3. CTS 4. N 5. CS 6. S 7. SS
Kondisi keuangan daerah (X5)	Kondisi keuangan suatu pemerintah merupakan kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban, mengantisipasi kejadian tak terduga dan menegakkan haknya secara efektif dan efisien.	<ol style="list-style-type: none"> 1. PAD meningkat dapat memenuhi kewajiban pemerintah 2. Pendapatan harus sesuai Peraturan Perundang-undangan PAD 	<p><i>Skala Likert:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. STS 2. TS 3. CTS 4. N 5. CS 6. S 7. SS

		<p>3. Sumber yang diterima pemerintah</p> <p>4. Partisipasi dan kesadaran masyarakat</p> <p>5. Kontribusi PAD</p> <p>6. Kondisi keuangan daerah</p> <p>(Leki, 2018) & (Ariwibowo, 2015)</p>	
Opini BPK atas LKPD (X6)	<p>Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan hasil pemeriksaan yang disusun serta disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secepatnya sesudah kegiatan pemeriksaan selesai. Adanya kegiatan pemeriksaan keuangan tersebut dapat menghasilkan opini. Opini adalah sebuah pernyataan yang profesional tentang kewajaran informasi keuangan yang dilampirkan dalam laporan keuangan.</p>	<p>1. Pelaksanaan audit eksternal</p> <p>2. Kewajaran laporan keuangan</p> <p>3. Kecukupan informasi</p> <p>4. Penyimpangan pengguna prinsip-prinsip akuntansi</p> <p>5. Proses audit</p> <p>6. Penilaian pengendalian internal</p> <p>(Ademirna, 2016)</p>	<p><i>Skala Likert:</i></p> <p>1. STS</p> <p>2. TS</p> <p>3. CTS</p> <p>4. N</p> <p>5. CS</p> <p>6. S</p> <p>7. SS</p>
Kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang (Y)	<p>Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian dalam mengimplementasikan suatu kegiatan/program/ dalam mencapai tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi sebagaimana tertuang dalam rumusan perencanaan suatu organisasi.</p> <p>Kinerja keuangan yaitu ukuran kinerja dengan</p>	<p>1. Masukan (<i>inputs</i>)</p> <p>2. Keluaran (<i>outputs</i>)</p> <p>3. Hasil (<i>outcomes</i>)</p> <p>4. Manfaat (<i>benefit</i>)</p> <p>5. Dampak (<i>impacts</i>)</p> <p>(Purnama F. &., 2016)</p>	<p><i>Skala Likert:</i></p> <p>1. STS</p> <p>2. TS</p> <p>3. CTS</p> <p>4. N</p> <p>5. CS</p> <p>6. S</p> <p>7. SS</p>

	menggunakan indikator keuangan.		
--	---------------------------------	--	--

Sumber: Data primer yang akan diolah.

3.6 Teknik Analisis

Teknik analisis data merupakan suatu cara menganalisis data agar mengubahnya menjadi informasi, sehingga karakteristik data dapat dipahami digunakan untuk memeriksa dan memecahkan masalah terkait penelitian tersebut.

3.6.1 Uji Kualitas Instrumen

Pada penelitian ini, variabel diukur dengan menggunakan instrumen kuesioner yang sebelumnya harus terlebih dahulu dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang sudah diterima. Pengujian ini bertujuan agar mengetahui apakah instrumen yang digunakan tersebut valid dan *reliabel* karena diolah kebenarannya akan menentukan hasil penelitian.

Uji analisis statistik deskriptif memberikan wawasan tentang pandangan suatu data dari mean, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum untuk masing-masing variabel independen dan variabel dependen. Analisis statistik deskriptif memiliki kaitan melalui metode pengumpulan, peringkasan dan penyajian data yang bersifat memberi gambaran dan sebelumnya menggunakan teknik analisis statistik yang memiliki fungsi untuk menguji hipotesis. Analisis statistik deskriptif dapat mengubah data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami.

3.6.2 Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas

Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut memiliki data yang valid dan sah sesuai fungsinya. Validitas menyakinkan ketepatan dan kecermatan suatu kuesioner dalam melakukan fungsi kuesionernya. Kuesioner dinyatakan valid dan sah jika sudah mampu menyatakan sesuatu yang diukur dengan kuesioner tersebut. Untuk mengetahui apakah suatu item valid atau tidak adalah dengan melihat adanya korelasi antara skor setiap item pertanyaan dalam kuesioner untuk skor tes. Uji signifikan ini dihitung jika nilai r -hitung $>$ r -tabel yang menunjukkan bahwa kuesioner tersebut valid dan jika nilai r -hitung $<$ r -tabel yang menunjukkan bahwa kuesioner tersebut tidak valid.

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui hasil uji konsistensi kuesioner dengan mengukur stabilitas kuesioner yang digunakan waktu ke waktu. Jika ingin mengetahui apakah suatu variabel itu *reliabel* atau tidak, maka harus dilakukan suatu uji statistik dengan menggunakan *Cronbach Alpha*. Jika nilai *Alpha* $>$ 0,6 maka variabel-variabel dalam pertanyaan tersebut dinyatakan *reliabel* dan jika nilai *Alpha* $<$ 0,6 maka variabel-variabel dalam pertanyaan tersebut dinyatakan tidak *reliable*.

3) Uji Asumsi Klasik

(1) Uji Multikolinearitas

Uji ini digunakan untuk menentukan apakah dalam regresi terdapat korelasi variabel independen. Multikolinearitas dapat diamati dari toleransi dan faktor inflasi varians. Sebuah VIF besar menunjukkan ada atau tidak adanya multikolinearitas dalam regresi. Jika toleransi rendah maka sama

dengan nilai VIF tinggi ($VIF = 1/\text{Toleransi}$) serta jika $VIF = 0$ maka toleransi = $1/10$ atau $0,1$.

(2) Uji Heteroskedastisitas

Hasil cetakan terlihat grafik *scatter plot* titik menunjukkan titik-titik distribusi secara acak serta berada di atas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, kami menyimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan.

(3) Uji Normalitas

Melalui analisis grafik terlihat histogram data observasi mendekati distribusi normal atau melihat probabilitas normal plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Distribusi data adalah normal bila garis yang digambarkan dari data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal. Atau melalui uji Kolmogorov Smirnov, bila $\text{sig.} > 0,05$ maka data berdistribusi normal.

4) Uji Regresi Linier Berganda (*Multiple Regression*)

Uji regresi linier berganda adalah teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut. Regresi linier berganda yaitu perluasan regresi sederhana, yang terdiri dari satu variabel dependen (terikat) dan dua atau lebih variabel independen (bebas). Regresi linier berganda juga membangun hubungan antara variabel dependen dan independen. Pada regresi linier berganda digunakan dalam menyimpulkan secara langsung apakah ada pengaruh dari variabel-variabel yang dipakai dengan cara bersama-sama.

Model Persamaan Regresi Linier Berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Keterangan:

- Y = Kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Semarang
- α = Nilai konstanta (nilai Y bila $X_k = 0$)
- β_1 - β_6 = Koefisien regresi X
- X_1 = Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
- X_2 = Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD
- X_3 = Transparansi pengelolaan keuangan daerah
- X_4 = Penyerapan anggaran
- X_5 = Kondisi keuangan daerah
- X_6 = Opini BPK atas LKPD
- e = Error dari observasi

5) Uji Hipotesis

(1) Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji t statistik adalah alat untuk menguji signifikan seberapa besar pengaruh variabel independen (X_1 dan X_2) secara parsial (individual) atau menguji partial regression coefficient (β_1 dan β_2) secara parsial dalam penjelasan variabel dependen (Y).

Berikut merupakan aturan uji t:

- Nilai t adalah nilai mutlak.
- Jika t-hitung (nilai mutlak) \leq t-tabel, maka H_0 diterima (H_a ditolak).
- Jika t-hitung (nilai mutlak) \geq t-tabel, maka H_0 ditolak (H_a diterima).

Atau

- a. Jika nilai signifikan $\geq \alpha$, berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau H_0 diterima (H_a ditolak).
- b. Jika nilai signifikan $\leq \alpha$, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen atau H_0 ditolak (H_a diterima).

(2) Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Uji F memiliki tujuan untuk menguji signifikan pengaruh variabel independen (X_1 dan X_2) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y).

Berikut merupakan aturan uji F:

- a. Nilai F adalah nilai mutlak.
- b. Jika F-hitung (nilai mutlak) \geq F-tabel, maka H_0 ditolak (H_a diterima).
- c. Jika F-hitung (nilai mutlak) \leq F-tabel, maka H_0 diterima (H_a ditolak).

Atau

- a. Jika nilai signifikan $\leq \alpha$, berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau H_0 ditolak (H_a diterima).
- b. Jika nilai signifikan $\geq \alpha$, berarti variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau H_0 diterima (H_a ditolak).

(3) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh semua variabel independen (bebas) terhadap nilai variabel

dependen (terikat). Koefisien determinasi memiliki besar nilai di antara angka 0 (nol) hingga angka 1 (satu).

Berikut merupakan aturan uji koefisien determinasi (R^2):

- a. Jika nilai koefisien determinasi semakin besar (\geq) atau mendekati angka 1, maka pengaruh variabel independen terhadap nilai variabel dependen semakin besar (\geq) atau semakin kuat.
- b. Jika nilai koefisien determinasi semakin kecil (\leq) atau mendekati angka 0, maka pengaruh variabel independen terhadap nilai variabel dependen semakin kecil (\leq) atau semakin lemah.

Jika dirumuskan menjadi sebagai berikut:

R^2 berada antara 0 dan 1 atau $0 \leq R^2 \leq 1$



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian/Responden

Penelitian ini berdasarkan pada jawaban yang diberikan oleh pejabat di seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Semarang. Sebanyak 91 kuesioner yang disebar ke OPD Kabupaten Semarang, mulai dari tanggal 25 Oktober 2021 sampai 10 November 2021.

Sebagai berikut rincian pengembalian kuesioner dalam penelitian:

Tabel 4.1
Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	91	100%
Kuesioner yang tidak kembali	13	14%
Kuesioner yang kembali	78	86%
Kuesioner yang cacat (tidak lengkap)	0	0%
Kuesioner yang dapat diolah	78	86%
N = 91		
Responden Rate = $(78/91) \times 100\% = 86\%$		

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Pada populasi penelitian sudah ditetapkan perhitungan sampel sebanyak 91 responden penelitian untuk dilakukan penyebaran kuesioner. Dari hasil penyebaran kuesioner tersebut pada tabel 4.1 diatas, sudah dapat menunjukkan bahwa terdapat kuesioner yang kembali sebanyak 78 kuesioner atau 86% (persen) dari jumlah kuesioner, kuesioner yang tidak kembali sebanyak 13 kuesioner atau 14% (persen) dari jumlah kuesioner, dan kuesioner yang cacat (tidak lengkap) sebanyak 0 kuesioner atau 0% (persen) dari jumlah kuesioner. Jadi kuesioner yang dapat diolah sebanyak 78 kuesioner atau 86% (persen) dari jumlah kuesioner.

Dari tabel 4.1 diatas, merupakan rincian OPD di kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rincian OPD Di Kuesioner Yang Dapat Diolah

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Semarang	Jumlah
1.	Barenlitbangda	15
2.	Badan Keuangan Daerah	21
3.	Dinas Komunikasi dan Informatika	7
4.	Inspektorat	1
5.	Sekretariat DPRD	1
6.	Badan Kepegawaian Daerah	1
7.	Dinas Arsip dan PERPUSDA	1
8.	Dinas Lingkungan Hidup	1
9.	Dinas Sosial	1
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1
11.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	2
12.	Dinas Kesehatan	1
13.	BLUD RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo	1
14.	BLUD RSUD dr. Gondo Suwarno	1
15.	DP3AKB	1
16.	DPMPTSP	1
17.	DISPERMADES	1
18.	Dinas Pekerjaan Umum	2
19.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1
20.	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan	1
21.	Dinas Perhubungan	1
22.	Dinas Pariwisata	1
23.	DKUPP	1
24.	Kecamatan Ambarawa	1
25.	Kecamatan Bancak	1
26.	Kecamatan Bandungan	1
27.	Kecamatan Bergas	1
28.	Kecamatan Bringin	1
29.	Kecamatan Jambu	1
30.	Kecamatan Pringapus	1
31.	Kecamatan Sumowono	1
32.	Kecamatan Suruh	1
33.	Kecamatan Tenganan	1
34.	Kecamatan Tuntang	1
35.	Kecamatan Ungaran Barat	1
36.	Kecamatan Ungaran Timur	1

TOTAL	78
--------------	-----------

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Data yang diperoleh dari tabel 4.2 diatas, merupakan hasil data dari menyebarkan kuesioner pada rincian populasi penelitian di tabel 3.1. Hasil data tersebut memperoleh 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dapat diolah dengan jumlah sampel 78 dari jumlah populasi ada 46 OPD dan jumlah sampel 91. Data tersebut diperoleh dari kuesioner melalui google form dengan cara menyebarkan menggunakan nomor kontak pribadi atau whatsapp dengan cara menghubungi OPD Kecamatan, Dinas, dan Badan. Salah satunya saya menghubungi OPD Kecamatan Ungaran Barat yang ada kenalan orang disana. Kemudian saya minta tolong untuk diisikan dan disebarakan lagi dalam grup whatsapp. Serta saya juga menghubungkan OPD dari Dinas dan Badan melalui nomor kontak pribadi yang didapatkan dari kenalan di Kecamatan tersebut agar seluruh kriteria yang dibutuhkan terpenuhi dalam penelitian ini.

4.1.1 Deskripsi Karakteristik Data Responden

1. Deskripsi Data Responden Berdasarkan Usia

Sebagai berikut ini adalah data responden berdasarkan usia yang dapat dilihat:

Tabel 4.3
Usia Responden

Usia	Jumlah	Persentase
20-30 Tahun	1	1.3%
31-40 Tahun	28	35.9%
41-50 Tahun	39	50%
>51 Tahun	10	12.8%
Total	78	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan hasil yang sudah didapatkan dalam tabel 4.3 diatas, menunjukkan bahwa responden Pejabat Organisasi Perangkat Daerah telah melaksanakan kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Semarang sesuai dengan usia masing-masing responden terdiri dari usia 20-30 tahun sebanyak 1 atau 1,3% (persen) responden, usia 31-40 tahun sebanyak 28 atau 35,9% (persen) responden, usia 41-50 Tahun sebanyak 39 atau 50% (persen) responden, dan usia >51 Tahun sebanyak 10 atau 12,8% (persen) responden. Pada tabel tersebut dapat disimpulkan rata-rata pejabat yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Semarang yaitu berusia 41-50 tahun.

2. Deskripsi Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sebagai berikut ini adalah data responden berdasarkan usia yang dapat dilihat:

Tabel 4.4
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	36	46.2%
Perempuan	42	53.8%
Total	78	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan hasil data yang sudah didapatkan dalam tabel 4.4 diatas, menunjukkan bahwa responden Pejabat Organisasi Perangkat Daerah telah melaksanakan kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Semarang melalui kuesioner yang kembali sebanyak 78. Diantaranya terdiri dari 36 atau 46,2% (persen) responden yaitu laki-laki dan 42 atau 53,8% (persen) responden yaitu perempuan. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa

kebanyakan pejabat yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Semarang yaitu perempuan.

3. Deskripsi Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Sebagai berikut ini adalah data responden berdasarkan usia yang dapat dilihat:

Tabel 4.5
Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SMA/SMK	-	-
D3	-	-
S1	50	64.1%
S2	28	35.9%
Lainnya	-	-
Total	78	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan dalam tabel 4.5 diatas, menunjukkan bahwa responden Pejabat Organisasi Perangkat Daerah telah melaksanakan kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Semarang yang sesuai dengan pendidikan terakhir responden terdiri dari SMA/SMK yaitu sebanyak 0 responden, D3 yaitu sebanyak 0 responden, S1 yaitu sebanyak 50 atau 64,1% (persen) responden, dan S2 yaitu sebanyak 28 atau 35,9% (persen) responden. Dari data diatas bisa disimpulkan bahwa pejabat yang banyak bekerja di OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) Kabupaten Semarang didominasi oleh responden yang memiliki pendidikan terakhir adalah S1.

4. Deskripsi Data Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Sebagai berikut ini adalah data responden berdasarkan usia yang dapat dilihat:

Tabel 4.6
Lama Kerja Responden

Lama Bekerja	Jumlah	Persentase
1-5 Tahun	2	2.6%
6-10 Tahun	3	3.8%
11-15 Tahun	33	42.3%
16-20 Tahun	23	29.5%
>21 Tahun	17	21.8%
Total	78	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, menunjukkan bahwa bagian terbesar responden memiliki lama kerja 11-15 tahun yaitu 33 orang atau 42,3%. Kondisi tersebut menyatakan bahwa rata-rata responden memiliki lama bekerja pada kisaran menengah.

5. Deskripsi Data Responden Berdasarkan Pangkat/Golongan

Sebagai berikut ini adalah data responden berdasarkan usia yang dapat dilihat:

Tabel 4.7
Pangkat/Golongan Responden

Pangkat/Golongan	Jumlah	Persentase
Penata Muda (III/a)	-	-
Penata Muda Tingkat I (III/b)	-	-
Penata (III/c)	12	15.4%
Penata Tingkat I (III/d)	48	61.5%
Pembina (IV/a)	16	20.5%
Pembina Tingkat I (IV/b)	2	2.6%
Total	78	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 4.7 diatas, menunjukkan bahwa responden Pejabat Organisasi Perangkat Daerah telah melaksanakan kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Semarang yang sesuai

dengan jabatan masing-masing responden terdiri dari penata (III/c) sebanyak 12 orang atau 15,4% (persen), penata Tingkat I (III/d) sebanyak 48 orang atau 61,5% (persen), pembina (IV/a) sebanyak 16 orang atau 20,5% (persen), dan pembina tingkat I (IV/b) sebanyak 2 orang atau 2,6% (persen). Jadi, dapat disimpulkan rata-rata responden memiliki jabatan Penata Tingkat I (III/d).

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel penelitian dapat digunakan untuk mengetahui tanggapan dari responden yang mengisi kuesioner tentang “Analisis Pengaruh Dimensi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang”. Penelitian tersebut berada dalam kategori sangat rendah, rendah, cukup rendah, sedang, cukup tinggi, tinggi, dan sangat tinggi. Adanya deskripsi tersebut dapat memudahkan dalam menjelaskan dari masing-masing indikator variabel dari tanggapan responden untuk mengkategorikan jawaban variabel penelitian (Soetanto, 2017).

Indeks pada kuesioner untuk tanggapan responden diambil dari skala *likert* yaitu 7 skor yang terdiri dari skor 1 Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 Tidak Setuju (TS), skor 3 Cukup Tidak Setuju (CTS), skor 4 Netral (N), skor 5 Cukup Setuju (CS), skor 6 Setuju (S), dan skor 7 Sangat Setuju (SS). Kecenderungan jawaban responden dapat dilihat dari rentang skala responden yang menggunakan rumus (Soetanto, 2017) sebagai berikut:

$$RS = \frac{m - n}{b}$$

Keterangan:

RS = Rentang Skala

m = Jumlah skor tertinggi pada skala kuesioner

n = jumlah skor terendah pada skala kuesioner

b = jumlah kelas atau variabel yang dibuat

Perhitungan tersebut yaitu sebagai berikut:

$$RS = \frac{7 - 1}{7} = 0.86$$

Dengan demikian kategori skala yang sudah ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4.8
Kategori Nilai Indeks

Nilai Indeks	Kategori
1,00-1,86	Sangat Rendah atau Sangat Tidak Baik
1.87-2.73	Rendah atau Tidak Baik
2.74-3.6	Cukup Rendah atau cukup Tidak Baik
3.7-4.56	Sedang atau Cukup
4.57-5.43	Cukup Tinggi atau Cukup Baik
5.44-6.3	Tinggi atau Baik
6.4-7.26	Sangat Tinggi atau Sangat Baik

4.2.1 Tanggapan Responden Terhadap Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (X1)

Berdasarkan nilai jawaban responden terhadap adanya variabel kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.9

Tanggapan Responden Terhadap Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Indikator	Tanggapan Responden Terhadap Variabel X1														Σ Skor	Mean
	STS		TS		CTS		N		CS		S		SS			
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S		
X1.1	0	0	0	0	0	0	2	8	3	17	3	21	0	0	394	5.05

X1.2	0	0	0	0	0	0	1	4	2	10	2	15	5	35	414	5.31
X1.3	0	0	0	0	0	0	1	4	5	25	3	20	3	26	499	6.40
X1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15	2	17	4	32	511	6.55
X1.5	0	0	0	0	1	3	1	4	4	20	4	26	2	19	487	6.24
X1.6	0	0	1	2	0	0	0	0	2	10	3	22	3	26	500	6.41
Rata-Rata Variabel X1																5.99

Keterangan: F (Tanggapan Responden), S (Skor)

Dari data tanggapan responden Pejabat Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Semarang pada masing-masing indikator variabel kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran yang diperoleh dari kuesioner yang sudah dikembalikan responden dapat dilihat pada tabel 4.9 diatas, menunjukkan bahwa sebagian Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Semarang telah merespon dengan kategori tinggi atau baik terhadap variabel ini. Terbukti pada besarnya nilai rata-rata variabel tersebut sebesar 5,99 termasuk kategori tinggi atau baik.

Respon tertinggi dari tanggapan responden terdapat pada indikator X1.4 yaitu rata-rata dengan skor sebesar 6,55 dalam kategori sangat tinggi atau sangat baik, sedangkan respon terendah dari tanggapan responden yaitu indikator X1.1 dengan rata-rata skor sebesar 5,05 dalam kategori cukup tinggi atau cukup baik. Hal ini dapat menunjukkan bahwa skor yang didapatkan memiliki interpretasi tinggi, dikarenakan diperoleh penilaian yang baik dari responden terhadap variabel kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran serta indikatornya.

4.2.2 Tanggapan Responden Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD (X2)

Berdasarkan nilai jawaban responden terhadap adanya kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.10
Tanggapan Responden Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD

Indikator	Tanggapan Responden Terhadap Variabel X2														Σ Skor	Mean
	STS		TS		CTS		N		CS		S		SS			
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S		
X2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	22	3	27	506	6.49
X2.2	0	0	0	0	0	0	4	1	7	3	3	22	2	20	482	6.18
X2.3	0	0	1	2	1	3	7	2	8	3	4	25	2	14	462	5.92
X2.4	1	1	1	2	0	0	1	4	4	2	4	25	2	20	482	6.18
X2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	24	3	25	502	6.44
X2.6	0	0	2	4	0	0	1	4	5	2	4	25	2	18	480	6.15
Rata-Rata Variabel X2																6.23

Keterangan: F (Tanggapan Responden), S (Skor)

Berdasarkan data tanggapan Pejabat Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Semarang yang kaitannya dengan variabel pengalokasian anggaran belanja dalam APBD yang didapatkan dari kuesioner yang sudah dikembalikan responden pada tabel 4.10 diatas, menunjukkan bahwa kebanyakan responden telah merespon dengan kategori tinggi atau baik. Terbukti dengan adanya nilai rata-rata pada variabel tersebut sebesar 6,23 termasuk dalam kategori tinggi atau baik.

Indikator X2.1 merupakan respon tertinggi dari tanggapan responden yaitu rata-rata skor sebesar 6,49 dalam kategori sangat tinggi atau sangat baik, sedangkan indikator X2.3 merupakan respon terendah dari tanggapan responden yaitu rata-rata skor sebesar 5,92 dalam kategori tinggi atau baik. Hasil ini dapat menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh memiliki interpretasi tinggi, oleh karena itu dapat

memperoleh penilaian yang baik dari responden terhadap variabel pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dan indikatornya.

4.2.3 Tanggapan Responden Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X3)

Berdasarkan nilai jawaban responden terhadap adanya kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.11
Tanggapan Responden Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator	Tanggapan Responden Terhadap Variabel X3														Σ Skor	Mean	
	STS		TS		CTS		N		CS		S		SS				
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S			
X3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	3	22	3	23	494	6.33
X3.2	0	0	0	0	0	0	2	8	6	3	2	16	4	30	501	6.42	
X3.3	0	0	0	0	0	0	7	2	1	6	2	16	3	21	473	6.06	
X3.4	0	0	0	0	2	6	7	2	8	9	4	2	17	3	21	470	6.03
X3.5	0	0	0	0	2	6	5	2	8	4	2	15	3	26	482	6.18	
X3.6	0	0	0	0	1	3	4	1	8	4	3	21	2	20	478	6.13	
Rata-Rata Variabel X3																	6.19

Keterangan: F (Tanggapan Responden), S (Skor)

Dari data tanggapan responden Pejabat Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Semarang pada masing-masing indikator variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah yang didapatkan dari kuesioner yang sudah dikembalikan responden pada tabel 4.11 diatas, dapat menunjukkan bahwa sebagian responden telah merespon dengan tinggi. Terlihat dengan memiliki nilai

rata-rata pada variabel tersebut yaitu sebesar 6,19 termasuk kategori tinggi atau baik.

Respon tertinggi dari tanggapan responden terdapat pada indikator X3.2 yaitu rata-rata dengan skor sebesar 6,42 dalam kategori sangat tinggi atau sangat baik, sedangkan respon terendah dari tanggapan responden yaitu indikator X3.4 dengan rata-rata skor sebesar 6,03 dalam kategori tinggi atau baik. Hal ini dapat menunjukkan bahwa skor yang didapatkan memiliki interpretasi tinggi, dikarenakan diperoleh penilaian yang baik dari responden terhadap variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah serta indikatornya.

4.2.4 Tanggapan Responden Terhadap Penyerapan Anggaran (X4)

Berdasarkan nilai jawaban responden terhadap adanya kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.12

Tanggapan Responden Terhadap Penyerapan Anggaran

Indikator	Tanggapan Responden Terhadap Variabel X4														Σ Skor	Mean	
	STS		TS		CTS		N		CS		S		SS				
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S			
X4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	25	4	28	2	17	488	6.26
X4.2	0	0	0	0	0	0	1	4	1	50	2	17	3	26	494	6.33	
X4.3	4	4	1	2	3	9	5	2	0	7	35	4	24	5	35	189	2.42
X4.4	4	4	9	1	2	6	6	2	4	5	25	6	36	3	27	183	2.35
X4.5	1	1	2	4	0	0	6	2	2	13	3	18	1	77	427	5.47	
X4.6	0	0	1	2	0	0	2	8	7	35	2	16	4	28	493	6.32	
Rata-Rata Variabel X4																4.86	

Keterangan: F (Tanggapan Responden), S (Skor)

Berdasarkan data tanggapan Pejabat Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Semarang yang kaitannya dengan variabel penyerapan anggaran yang didapatkan dari kuesioner yang sudah dikembalikan responden pada tabel 4.12 diatas, menunjukkan bahwa kebanyakan responden telah merespon dengan kategori cukup tinggi. Terbukti dengan adanya nilai rata-rata pada variabel tersebut sebesar 4,86 termasuk dalam kategori cukup tinggi atau cukup baik.

Indikator X4.2 merupakan respon tertinggi dari tanggapan responden yaitu rata-rata skor sebesar 6,33 dalam kategori sangat tinggi atau sangat baik, sedangkan indikator X4.4 merupakan respon terendah dari tanggapan responden yaitu rata-rata skor sebesar 2,35 dalam kategori rendah atau tidak baik. Hasil ini dapat menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh memiliki interpretasi cukup tinggi, oleh karena itu dapat memperoleh penilaian yang cukup baik dari responden terhadap variabel penyerapan anggaran dan indikatornya.

4.2.5 Tanggapan Responden Terhadap Kondisi Keuangan Daerah (X5)

Berdasarkan nilai jawaban responden terhadap adanya kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.13

Tanggapan Responden Terhadap Kondisi Keuangan Daerah

Indikator	Tanggapan Responden Terhadap Variabel X5														Σ Skor	Mean
	STS		TS		CTS		N		CS		S		SS			
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S		
X5.1	0	0	0	0	0	0	1	4	3	1	4	28	2	18	490	6.28
X5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	16	5	35	532	6.82
X5.3	0	0	2	4	1	3	4	1	9	4	4	24	2	15	455	5.83
X5.4	5	5	3	6	2	6	6	3	6	3	2	17	2	18	446	5.72

	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S		
X6.1	0	0	0	0	0	0	5	2	2	10	3	22	3	25	510	6.54
X6.2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	25	2	13	5	35	514	6.59
X6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	3	22	3	26	504	6.46
X6.4	0	0	0	0	0	0	2	8	7	35	3	19	3	25	493	6.32
X6.5	0	0	0	0	0	0	1	4	3	15	3	21	3	25	494	6.33
X6.6	0	0	0	0	0	0	3	1	3	17	3	22	0	0	409	5.24
Rata-Rata Variabel X6																6.25

Keterangan: F (Tanggapan Responden), S (Skor)

Berdasarkan data tanggapan Pejabat Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Semarang yang kaitannya dengan variabel opini BPK atas LKPD yang didapatkan dari kuesioner yang sudah dikembalikan responden pada tabel 4.14 diatas, menunjukkan bahwa kebanyakan responden telah merespon dengan kategori tinggi. Terbukti dengan adanya nilai rata-rata pada variabel tersebut sebesar 6,25 termasuk dalam kategori tinggi atau baik.

Indikator X6.2 merupakan respon tertinggi dari tanggapan responden yaitu rata-rata skor sebesar 6,59 dalam kategori sangat tinggi atau sangat baik, sedangkan indikator X6.6 merupakan respon terendah dari tanggapan responden yaitu rata-rata skor sebesar 5,24 dalam kategori cukup tinggi atau cukup baik. Hasil ini dapat menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh memiliki interpretasi tinggi, oleh karena itu dapat memperoleh penilaian yang baik dari responden terhadap variabel opini BPK atas LKPD dan indikatornya.

4.2.7 Tanggapan Responden Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang (Y)

Berdasarkan nilai jawaban responden terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.15
Tanggapan Responden Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Semarang

Indikator	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Y														Σ Skor	Mean								
	STS		TS		CTS		N		CS		S		SS											
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S										
Y1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	2	4	24	3	22	491	6.29								
Y2	0	0	0	0	0	0	2	8	9	4	2	17	3	26			493	6.32						
Y3	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	4	29	2	16					487	6.24				
Y4	0	0	0	0	0	0	1	4	7	3	4	25	2	19							487	6.24		
Y5	0	0	0	0	0	0	1	4	8	4	3	22	3	22									490	6.28
Rata-Rata Variabel Y																								

Keterangan: F (Tanggapan Responden), S (Skor)

Dari data tanggapan responden Pejabat Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Semarang pada masing-masing indikator variabel kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang yang didapatkan dari kuesioner yang sudah dikembalikan responden pada tabel 4.15 diatas, dapat menunjukkan bahwa sebagian responden telah merespon dengan tinggi. Terlihat dengan memiliki nilai rata-rata pada variabel tersebut yaitu sebesar 6,28 termasuk kategori tinggi atau baik.

Respon tertinggi dari tanggapan responden terdapat pada indikator Y2 yaitu rata-rata dengan skor sebesar 6,32 dalam kategori sangat tinggi atau sangat baik, sedangkan respon terendah dari tanggapan responden yaitu indikator Y3 dan Y4 dengan rata-rata skor sebesar 6,24 dalam kategori tinggi atau baik. Hal ini dapat

menunjukkan bahwa skor yang didapatkan memiliki interpretasi tinggi, dikarenakan diperoleh penilaian yang baik dari responden terhadap variabel kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang serta indikatornya.

4.3 Teknik Analisis

4.3.1 Uji Kualitas Instrumen

Uji kualitas instrumen ini menggunakan analisis statistik deskriptif yaitu tentang wawasan pandangan data dari mean, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, opini BPK atas LKPD terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang yang diuji dengan analisis statistik deskriptif. Sebagai berikut tabel analisis statistik deskriptif:

Tabel 4.16
Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	78	28	42	38.69	2.529
Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	78	23	42	37.37	3.003
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	78	26	42	37.15	4.249
Penyerapan Anggaran	78	22	42	31.07	4.690
Kondisi Keuangan Daerah	78	27	42	37.22	3.159
Opini BPK atas LKPD	78	32	42	38.55	2.854
Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang	78	21	35	31.31	2.765

Valid N (listwise)	27				
--------------------	----	--	--	--	--

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan data hasil dari tabel 4.16 yang terdapat diatas maka dapat dijelaskan lebih rinci untuk masing-masing variabel tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran

Pada variabel kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran terdapat 6 item pertanyaan kuesioner dengan skala scale 7, yang menghasilkan total maksimum sebesar $7 \times 6 = 42$. Berdasarkan variabel kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran terdapat hasil dari responden dengan nilai minimum sebesar 28, nilai maksimum sebesar 42 dan mendapatkan nilai rata-rata (*mean*) pada variabel tersebut sebesar 38,69 serta nilai standar deviasi sebesar 2.529. Hasil nilai rata-rata diatas dapat dikatakan bahwa responden banyak memilih skala scale 7 dengan rata-rata sangat setuju dapat disimpulkan bahwa responden mempunyai kemampuan dalam pemahaman tentang variabel kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, serta dapat membantu Pejabat Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dalam meningkatkan yang terkait dengan kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

2. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD

Pada variabel pengalokasian anggaran belanja dalam APBD terdapat 6 item pertanyaan kuesioner dengan skala scale 7, yang menghasilkan total maksimum sebesar $7 \times 6 = 42$. Berdasarkan variabel pengalokasian anggaran belanja dalam APBD terdapat hasil dari responden dengan nilai minimum sebesar 23, nilai maksimum sebesar 42 dan mendapatkan nilai rata-rata (*mean*) pada variabel tersebut sebesar 37,37 serta nilai standar deviasi sebesar 3,003.

Hasil nilai rata-rata diatas dapat dikatakan bahwa responden banyak memilih skala scale 6 dengan rata-rata setuju dapat disimpulkan bahwa responden mempunyai kemampuan dalam pemahaman tentang variabel pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, serta dapat membantu Pejabat Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dalam meningkatkan yang terkait dengan kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah terdapat 6 item pertanyaan kuesioner dengan skala scale 7, yang menghasilkan total maksimum sebesar $7 \times 6 = 42$. Berdasarkan variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah terdapat hasil dari responden dengan nilai minimum sebesar 26, nilai maksimum sebesar 42 dan mendapatkan nilai rata-rata (mean) pada variabel tersebut sebesar 37,15 serta nilai standar deviasi sebesar 4,249. Hasil nilai rata-rata diatas dapat dikatakan bahwa responden banyak memilih skala scale 7 dengan rata-rata sangat setuju dapat disimpulkan bahwa responden mempunyai kemampuan dalam pemahaman tentang variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta dapat membantu Pejabat Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dalam meningkatkan yang terkait dengan kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

4. Penyerapan Anggaran

Pada variabel penyerapan anggaran terdapat 6 item pertanyaan kuesioner dengan skala scale 7, yang menghasilkan total maksimum sebesar $7 \times 6 = 42$. Berdasarkan variabel penyerapan anggaran terdapat hasil dari responden dengan nilai minimum sebesar 24, nilai maksimum sebesar 42 dan mendapatkan nilai

rata-rata (mean) pada variabel tersebut sebesar 31,07 serta nilai standar deviasi sebesar 4,690. Hasil nilai rata-rata diatas dapat dikatakan bahwa responden banyak memilih skala scale 1 dengan rata-rata sangat tidak setuju dapat disimpulkan bahwa responden mempunyai kemampuan dalam pemahaman tentang variabel penyerapan anggaran, serta dapat membantu Pejabat Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dalam meningkatkan yang terkait dengan kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

5. Kondisi Keuangan Daerah

Pada variabel kondisi keuangan daerah terdapat 6 item pertanyaan kuesioner dengan skala scale 7, yang menghasilkan total maksimum sebesar $7 \times 6 = 42$. Berdasarkan variabel kondisi keuangan daerah terdapat hasil dari responden dengan nilai minimum sebesar 27, nilai maksimum sebesar 42 dan mendapatkan nilai rata-rata (mean) pada variabel tersebut sebesar 37,22 serta nilai standar deviasi sebesar 3,159. Hasil nilai rata-rata diatas dapat dikatakan bahwa responden banyak memilih skala scale 6 dengan rata-rata setuju dapat disimpulkan bahwa responden mempunyai kemampuan dalam pemahaman tentang variabel kondisi keuangan daerah, serta dapat membantu Pejabat Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dalam meningkatkan yang terkait dengan kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

6. Opini BPK Atas LKPD

Pada variabel opini BPK atas LKPD terdapat 6 item pertanyaan kuesioner dengan skala scale 7, yang menghasilkan total maksimum sebesar $7 \times 6 = 42$. Berdasarkan variabel opini BPK atas LKPD terdapat hasil dari responden dengan nilai minimum sebesar 32, nilai maksimum sebesar 42 dan mendapatkan

nilai rata-rata (mean) pada variabel tersebut sebesar 38,55 serta nilai standar deviasi sebesar 2,854. Hasil nilai rata-rata diatas dapat dikatakan bahwa responden banyak memilih skala scale 7 dengan rata-rata sangat setuju dapat disimpulkan bahwa responden mempunyai kemampuan dalam pemahaman tentang variabel opini BPK atas LKPD, serta dapat membantu Pejabat Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dalam meningkatkan yang terkait dengan kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

7. Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang

Pada variabel kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang terdapat 5 item pertanyaan kuesioner dengan skala scale 7, yang menghasilkan total maksimum sebesar $7 \times 5 = 35$. Berdasarkan variabel kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang terdapat hasil dari responden dengan nilai minimum sebesar 21, nilai maksimum sebesar 35 dan mendapatkan nilai rata-rata (mean) pada variabel tersebut sebesar 31,31 serta nilai standar deviasi sebesar 2,765. Hasil nilai rata-rata diatas dapat dikatakan bahwa responden banyak memilih skala scale 1 dengan rata-rata sangat tidak setuju dapat disimpulkan bahwa responden mempunyai kemampuan dalam pemahaman tentang variabel kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang, serta dapat membantu Pejabat Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dalam meningkatkan yang terkait dengan kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

4.3.2 Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas

Uji validitas untuk mengetahui apakah setiap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut sudah valid atau tidak. Penguji validitas menggunakan korelasi pearson selain itu juga menggunakan perbandingan r-hitung dengan r-tabel dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini *degree of freedom* (df) = n-2, dalam hal ini n yaitu jumlah sampel. (df) = 78-2 maka diperoleh angka 76 dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 didapatkan r-tabel yaitu 0,2227 dibulatkan menjadi 0,223. Sebagai berikut gambar dari r-tabel yang digunakan dalam

Tabel r untuk df = 51 - 100

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568

Gambar 4.1

Tabel r

Berikut beberapa kriteria dalam pengujian validitas:

- Jika nilai r-hitung > r-tabel, maka setiap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner menunjukkan valid.
- Jika nilai r-hitung < r-tabel, maka setiap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner menunjukkan tidak valid.

Sebagai berikut ini adalah tabel data hasil dari uji validitas dari beberapa variabel untuk setiap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan dalam penelitian:

Tabel 4.17

Hasil Uji Validitas Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
X1.1	0.627	0.223	Valid
X1.2	0.697	0.223	Valid
X1.3	0.815	0.223	Valid
X1.4	0.656	0.223	Valid
X1.5	0.602	0.223	Valid
X1.6	0.494	0.223	Valid

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2021

Dapat dilihat pada tabel 4.17 diatas, menunjukkan bahwa setiap item koefisien korelasi pertanyaan dalam variabel kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran memiliki nilai lebih dari r-tabel (0,223), maka dinyatakan valid semua dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian ini. Dengan begitu, item-item pertanyaan dalam kuesioner penelitian dapat digunakan untuk mengukur variabel kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dengan pengujian yaitu uji reliabilitas.

Tabel 4.18

Hasil Uji Validitas Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD

Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
X2.1	0.422	0.223	Valid
X2.2	0.544	0.223	Valid
X2.3	0.690	0.223	Valid
X2.4	0.720	0.223	Valid
X2.5	0.444	0.223	Valid
X2.6	0.740	0.223	Valid

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2021

Dapat dilihat pada tabel 4.18 diatas, menunjukkan bahwa setiap item koefisien korelasi pertanyaan dalam variabel pengalokasian anggaran belanja dalam APBD memiliki nilai lebih dari r-tabel (0,223), maka dinyatakan valid semua dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian ini. Dengan begitu, item-item pertanyaan dalam kuesioner penelitian dapat digunakan untuk mengukur variabel pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dengan pengujian yaitu uji reliabilitas.

Tabel 4.19
Hasil Uji Validitas Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
X3.1	0.709	0.223	Valid
X3.2	0.785	0.223	Valid
X3.3	0.821	0.223	Valid
X3.4	0.841	0.223	Valid
X3.5	0.811	0.223	Valid
X3.6	0.790	0.223	Valid

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2021

Dapat dilihat pada tabel 4.19 diatas, menunjukkan bahwa setiap item koefisien korelasi pertanyaan dalam variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai lebih dari r-tabel (0,223), maka dinyatakan valid semua dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian ini. Dengan begitu, item-item pertanyaan dalam kuesioner penelitian dapat digunakan untuk mengukur variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dengan pengujian yaitu uji reliabilitas.

Tabel 4.20
Hasil Uji Validitas Penyerapan Anggaran

Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
X4.1	0.571	0.223	Valid
X4.2	0.573	0.223	Valid

X4.3	0.775	0.223	Valid
X4.4	0.674	0.223	Valid
X4.5	0.619	0.223	Valid
X4.6	0.609	0.223	Valid

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2021

Dapat dilihat pada tabel 4.20 diatas, menunjukkan bahwa semua item koefisien korelasi pertanyaan dalam variabel penyerapan anggaran memiliki nilai lebih dari r-tabel (0,223), maka semuanya dinyatakan valid. Dengan begitu, item-item pertanyaan dalam kuesioner penelitian dapat digunakan untuk mengukur variabel penyerapan anggaran dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dengan pengujian yaitu uji reliabilitas.

Tabel 4.21

Hasil Uji Validitas Kondisi Keuangan Daerah

Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
X5.1	0.380	0.223	Valid
X5.2	0.451	0.223	Valid
X5.3	0.698	0.223	Valid
X5.4	0.710	0.223	Valid
X5.5	0.700	0.223	Valid
X5.6	0.724	0.223	Valid

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2021

Dapat dilihat pada tabel 4.21 diatas, menunjukkan bahwa setiap item koefisien korelasi pertanyaan dalam variabel kondisi keuangan daerah daerah memiliki nilai lebih dari r-tabel (0,223), maka dinyatakan valid semua dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian ini. Dengan begitu, item-item pertanyaan dalam kuesioner penelitian dapat digunakan untuk mengukur variabel kondisi keuangan daerah dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dengan pengujian yaitu uji reliabilitas.

Tabel 4.22
Hasil Uji Validitas Opini BPK Atas LKPD

Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
X6.1	0.751	0.223	Valid
X6.2	0.718	0.223	Valid
X6.3	0.769	0.223	Valid
X6.4	0.769	0.223	Valid
X6.5	0.768	0.223	Valid
X6.6	0.703	0.223	Valid

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2021

Dapat dilihat pada tabel 4.22 diatas, menunjukkan bahwa setiap item koefisien korelasi pertanyaan dalam variabel opini BPK atas LKPD memiliki nilai lebih dari r-tabel (0,223), maka dinyatakan valid semua dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian ini. Dengan begitu, item-item pertanyaan dalam kuesioner penelitian dapat digunakan untuk mengukur variabel opini BPK atas LKPD dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dengan pengujian yaitu uji reliabilitas.

Tabel 4.23
Hasil Uji Validitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang

Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Y1	0.698	0.223	Valid
Y2	0.747	0.223	Valid
Y3	0.711	0.223	Valid
Y4	0.753	0.223	Valid
Y5	0.799	0.223	Valid

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2021

Dapat dilihat pada tabel 4.23 diatas, menunjukkan bahwa setiap item koefisien korelasi pertanyaan dalam variabel kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang memiliki nilai lebih dari r-tabel (0,223), maka dinyatakan valid semua dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian ini. Dengan

begitu, item-item pertanyaan dalam kuesioner penelitian dapat digunakan untuk mengukur variabel kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dengan pengujian yaitu uji reliabilitas.

2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat yang digunakan sebagai pengukuran suatu kuesioner yang merupakan indikator variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel, jika jawaban tanggapan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan harus konsisten dari waktu ke waktu. Variabel yang dinyatakan reliabel harus melebihi nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$. Sedangkan nilai Alpha $< 0,60$ teridentifikasi ada beberapa jawaban tanggapan responden yang tidak konsisten dan harus dibuang dengan melihat satu per satu jawaban tanggapan responden yang tidak konsisten (Ghozali, 2018). Uji reliabilitas untuk mengetahui apakah suatu variabel itu *reliabel* atau tidak.

Dari hasil tanggapan jawaban responden terdapat beberapa responden yang menjawab secara tidak konsisten dalam penelitian ini. Pada penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel yang dijawab dengan tidak konsisten yaitu variabel penyerapan anggaran (X4) dan kondisi keuangan daerah (X5). Responden yang menjawab secara tidak konsisten jika ada item penyerapan anggaran dan kondisi keuangan anggaran dijawab dengan skala 1 dan ada item penyerapan anggaran dan kondisi keuangan anggaran dijawab dengan skala 7, maka responden yang menjawab seperti ini harus dibuang seperti contoh di buku SPSS (Ghozali, 2018). Ada 55 responden dengan menjawab secara tidak konsisten. Berikut tabel hasil penelitian dari uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS Statistic 22:

Tabel 4.24
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	0.714	Reliabel
Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	0.655	Reliabel
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	0.878	Reliabel
Penyerapan Anggaran	0.686	Reliabel
Kondisi Keuangan Daerah	0.662	Reliabel
Opini BPK atas LKPD	0.838	Reliabel
Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang	0.773	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2021

Dari hasil pengujian reliabilitas pada tabel 4.24 diatas, menunjukkan bahwa variabel kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran memiliki α -hitung $0,714 > 0,6$ yang dinyatakan reliabel, pengalokasian anggaran, belanja dalam APBD memiliki α -hitung $0,655 > 0,6$ yang dinyatakan reliabel, , transparansi pengelolaan keuangan daerah memiliki α -hitung $0,878 > 0,6$ yang dinyatakan reliabel, penyerapan anggaran memiliki α -hitung $0,686 > 0,6$ yang dinyatakan reliabel, kondisi keuangan daerah memiliki α -hitung yaitu $0,662 > 0,6$ yang dinyatakan reliabel, opini BPK atas LKPD memiliki α -hitung $0,838 > 0,6$ yang dinyatakan reliabel, dan kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang memiliki α -hitung $0.773 > 0,6$ yang dinyatakan reliabel. Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa semua data variabel penelitian mempunyai koefisien Alpha yang cukup besar atau $> 0,6$ yang dinyatakan reliabel. Oleh karena itu, item-item pada masing-masing variabel penelitian tersebut semuanya layak untuk digunakan sebagai alat ukur.

3) Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan sebagai dasar cara menentukan ketepatan model regresi untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menentukan apakah dalam regresi terdapat korelasi variabel independen. Pengujian multikolinearitas diamati dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi yang baik merupakan model yang tidak terjadi atau bebas dari multikolinearitas yaitu memiliki nilai *tolerance* ≥ 0.10 atau nilai VIF ≤ 10 .

Tabel 4.25
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	0.490	2.039	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	0.573	1.746	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	0.565	1.770	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Penyerapan Anggaran	0.636	1.573	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Kondisi Keuangan Daerah	0.545	1.835	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Opini BPK atas LKPD	0.501	1.998	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2021

Berdasarkan SPSS Statistics 22 terlihat hasil perhitungan yang ada dalam tabel 4.25 diatas, menunjukkan bahwa semua variabel independen (bebas) penelitian mempunyai nilai *tolerance* $\geq 0,1$ dan nilai VIF ≤ 10 sehingga dapat dinyatakan semua variabel-variabel yang digunakan tidak terjadi adanya multikolinieritas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Penguji ini menggunakan uji *Scatter Plot*. Pada grafik scatter plot dapat dilihat di antara suatu nilai variabel yang ada kaitan dengan ZPRED dan SRESID maka bisa menemukan apakah terjadi heteroskedastisitas. Berikut kriteria pada uji heteroskedastisitas:

- a. Jika dilihat dari grafik *scatter plot* titik tersebut menunjukkan bahwa titik-titik distribusi secara acak atau tidak berada pada sumbu X dan Y, maka dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika dilihat dari grafik *scatter plot* titik tersebut menunjukkan bahwa titik-titik distribusi sama dengan atau berada pada sumbu X dan Y, maka dinyatakan terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4.2

Grafik Scatterplot (Hasil Uji Heteroskedastisitas)

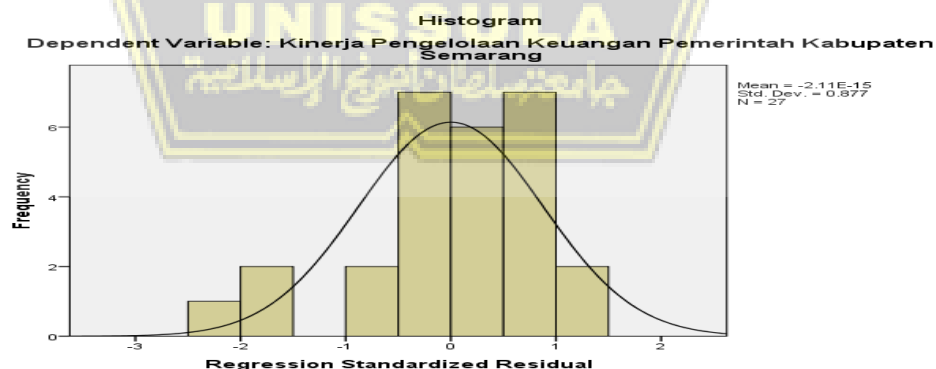
Berdasarkan dari hasil gambar grafik *scatter plot* dari dalam pengujian heteroskedastisitas pada SPSS Statistics 22 diatas, menunjukkan bahwa titik-titik tersebut acak atau tidak berada pada sumbu X dan Y tetapi ada titik-titik yang tidak acak dan bertumpukan. Dengan begitu, model regresi

yang digunakan dalam penelitian ini terjadi heteroskedastisitas. Jadi, kesimpulannya ada gangguan dalam model regresi ini.

3. Uji Normalitas

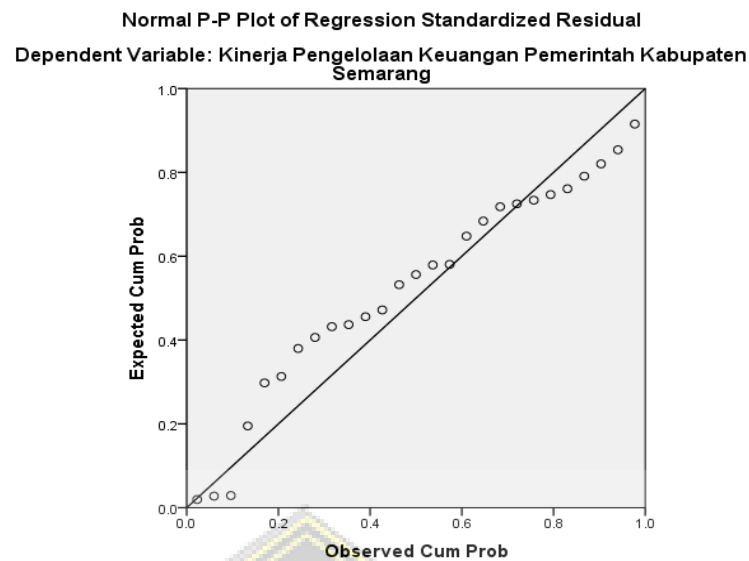
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data yang diperoleh tersebut distribusi secara normal atau tidak dalam model regresi. Model yang baik yaitu model yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Berdasarkan hasil uji normalitas data dengan menggunakan analisis grafik yaitu grafik histogram dan normal p-p plot pada SPSS Statistics 22. Grafik histogram menunjukkan bahwa garis kurva berbentuk lonceng di tengah, sedangkan grafik batang semuanya berada dalam garis kurva tersebut. Pada uji analisis grafik histogram tersebut dinyatakan berdistribusi normal. Grafik normal p-p plot menunjukkan bahwa titik-titik menyebar dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Oleh karena itu data dinyatakan berdistribusi dengan normal.



Gambar 4.3

Grafik Histogram (Hasil Uji Normalitas)



Gambar 4.4

Grafik Normal P-P Plot (Hasil Uji Normalitas)

Uji normalitas juga bisa dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov, bila $\text{sig} > 0,05$ maka data berdistribusi normal dan bila $\text{sig} < 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal. Berikut tabel one-sample kolmogorov-smirnov test pada SPSS Statistics 22:

Tabel 4.26

Hasil Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test)

		Unstandardized Residual
N		78
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.012958
Most Extreme Differences	Absolute	.141
	Positive	.096
	Negative	-.141
Test Statistic		.141
Asymp. Sig (2-tailed)		.177 ^c

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2021

Berdasarkan tabel 4.26 diatas, menunjukkan bahwa nilai Test Statistic Kolmogorov-Smirnov yaitu 0,141 dan Asymp. Sig (2-tailed) yaitu 0,177 >

0,05. Jadi, pada uji ini tidak dapat menolak H_0 yang dapat menyatakan bahwa residual berdistribusi normal.

4) Uji Regresi Linier Berganda (*Multiple Regression*)

Uji regresi linier berganda digunakan untuk menyimpulkan apakah ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen yang dipakai secara bersama-sama. Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi sedangkan variabel dependen yaitu variabel terikat. Pada perhitungan regresi linier berganda menggunakan variabel kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini BPK atas LKPD terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang. Hasil dari pengujian regresi linier berganda pada SPSS Statistics 22 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.27
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients
	B
(Constant)	6.147
Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	0.328
Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	0.157
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	0.193
Penyerapan Anggaran	0.186
Kondisi Keuangan Daerah	-0.096
Opini BPK atas LKPD	-0.085

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2021

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda pada tabel 4.27 diatas, maka memperoleh persamaan regresi yang dapat disimpulkan dan dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang} = 6,147 + 0,328X_1 + 0,157X_2 + 0,193X_3 + 0,186X_4 - 0,096X_5 - 0,085X_6 + e$$

Keterangan:

1. Nilai konstanta sebesar 6,147. Nilai tersebut memiliki arti bahwa apabila variabel-variabel independen (bebas) yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini BPK atas LKPD maka nilai kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang sebesar 6,147.
2. Nilai koefisien regresi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran sebesar 0,328 yang mempunyai arah regresi positif, artinya apabila kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran semakin meningkat, maka semakin meningkat pencapaian kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang sebesar 0,328.
3. Nilai koefisien regresi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD sebesar 0,157 yang mempunyai arah regresi positif, artinya apabila pengalokasian anggaran belanja dalam APBD semakin meningkat, maka semakin meningkat pencapaian kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang sebesar 0,157.
4. Nilai koefisien regresi transparansi pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,193 yang mempunyai arah regresi positif, artinya apabila transparansi

pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat, maka semakin meningkat pencapaian kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang sebesar 0,193.

5. Nilai koefisien regresi penyerapan anggaran sebesar 0,186 yang mempunyai arah regresi positif, artinya apabila penyerapan anggaran semakin meningkat, maka semakin meningkat pencapaian kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang sebesar 0,186.
6. Nilai koefisien regresi kondisi keuangan daerah sebesar -0,096 yang mempunyai arah regresi negatif, artinya apabila kondisi keuangan daerah semakin meningkat, maka semakin menurun pencapaian kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang sebesar 0,096.
7. Nilai koefisien regresi opini BPK atas LKPD sebesar -0,085 yang mempunyai arah regresi negatif, artinya apabila opini BPK atas LKPD semakin meningkat, maka semakin menurun pencapaian kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang sebesar 0,085.

5) Uji Hipotesis

(1) Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji t statistik digunakan untuk menguji signifikan seberapa besar pengaruh variabel independen (kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini BPK atas LKPD) secara parsial (individual) terhadap variabel dependen (kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang).

Tabel 4.28
Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Variabel	Unstandar dized Coefficien ts	Bunyi Hipotesis	Sig.	Keterangan	Kesimp ulan
	B				
(Constant)	6.147		0.444		
Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	0.328	Positif	0.170	Positif dan tidak signifikan	Ditolak
Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	0.157	Positif	0.371	Positif dan tidak signifikan	Ditolak
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	0.193	Positif	0.184	Positif dan tidak signifikan	Ditolak
Penyerapan Anggaran	0.186	Positif	0.148	Positif dan tidak signifikan	Ditolak
Kondisi Keuangan Daerah	-0.096	Negatif	0.599	Negatif dan tidak signifikan	Ditolak
Opini BPK atas LKPD	-0.085	Negatif	0.716	Negatif dan tidak signifikan	Ditolak

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2021

Berikut penjelasan dari hasil uji hipotesis parsial (uji t) pada tabel 4.28 diatas:

a. Pengaruh Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang

Hasil perhitungan dari tabel 4.28 diatas, mendapatkan hasil nilai koefisien regresi sebesar 0,328 dan bernilai positif yang dapat dilihat

dari arah positif atau negatif koefisien regresi tersebut diartikan bahwa kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Selain dilihat dari nilai koefisien regresi dapat juga disimpulkan dengan hasil perhitungan signifikan yang memperoleh nilai sebesar $0,170 \geq 0,05$ disimpulkan bahwa **hipotesis pertama (H1)** yaitu **tidak signifikan, hipotesis ditolak**. Dengan begitu, hipotesis pertama (H1): “Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (X1) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang (Y) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)”, tidak terbukti kebenarannya.

b. Pengaruh Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang

Hasil perhitungan dari tabel 4.28 diatas, mendapatkan hasil nilai koefisien regresi sebesar 0,157 dan bernilai positif yang dapat dilihat dari arah positif atau negatif koefisien regresi tersebut diartikan bahwa pengalokasian anggaran belanja dalam APBD berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Selain dilihat dari nilai koefisien regresi dapat juga disimpulkan dengan hasil perhitungan signifikan yang memperoleh nilai sebesar $0,371 \geq 0,05$ disimpulkan bahwa **hipotesis kedua (H2)** yaitu **tidak**

signifikan, hipotesis ditolak. Sehingga hipotesis kedua (H2): “Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (X2) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang (Y) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)”, tidak terbukti kebenarannya.

c. Pengaruh Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang

Hasil perhitungan dari tabel 4.28 diatas, mendapatkan hasil nilai koefisien regresi sebesar 0,193 dan bernilai positif yang dapat dilihat dari arah positif atau negatif koefisien regresi tersebut diartikan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Selain dilihat dari nilai koefisien regresi dapat juga disimpulkan dengan hasil perhitungan signifikan yang memperoleh nilai sebesar $0,184 \geq 0,05$ disimpulkan bahwa **hipotesis ketiga (H3) yaitu tidak signifikan, hipotesis ditolak.** Sehingga hipotesis ketiga (H3): “Transparansi pengelolaan keuangan daerah (X3) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang (Y) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)”, tidak terbukti kebenarannya.

d. Pengaruh Dimensi Penyerapan Anggaran Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang

Hasil perhitungan dari tabel 4.28 diatas, mendapatkan hasil koefisien regresi sebesar 0,186 dan bernilai positif yang dapat dilihat dari arah positif atau negatif koefisien regresi tersebut diartikan bahwa penyerapan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Selain dilihat dari nilai koefisien regresi dapat juga disimpulkan dengan hasil perhitungan signifikan yang memperoleh nilai sebesar $0,148 \geq 0,05$ disimpulkan bahwa **hipotesis keempat (H4)** yaitu **tidak signifikan, hipotesis ditolak**. Sehingga hipotesis keempat (H4): “Penyerapan anggaran (X4) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang (Y) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)”, tidak terbukti kebenarannya.

e. Pengaruh Dimensi Kondisi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang

Hasil perhitungan dari tabel 4.28 diatas, mendapatkan hasil koefisien regresi sebesar -0,096 dan bernilai negatif yang dapat dilihat dari arah positif atau negatif koefisien regresi tersebut diartikan bahwa kondisi keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Selain dilihat dari nilai koefisien regresi dapat juga disimpulkan dengan hasil perhitungan signifikan yang memperoleh nilai sebesar $0,599 \geq 0,05$ disimpulkan bahwa **hipotesis kelima (H5)** yaitu **tidak signifikan, hipotesis ditolak**, disimpulkan tidak ada pengaruh dan

tidak signifikan. Sehingga hipotesis kelima (H5): “Kondisi keuangan daerah (X5) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang (Y) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)”, tidak terbukti kebenarannya.

f. Pengaruh Dimensi Opini BPK Atas LKPD Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang

Hasil perhitungan dari tabel 4.28 diatas, mendapatkan hasil koefisien regresi sebesar -0,085 dan bernilai negatif yang dapat dilihat dari arah positif atau negatif koefisien regresi tersebut diartikan bahwa opini BPK atas LKPD berpengaruh negatif terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Sedangkan dilihat dari hasil perhitungan signifikan memperoleh nilai sebesar $0,716 \geq 0,05$ disimpulkan bahwa **hipotesis keenam (H6)** yaitu **tidak signifikan, hipotesis ditolak**. Sehingga diartikan hipotesis keenam (H6): “Opini BPK atas LKPD berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)”, tidak terbukti kebenarannya.

(2) Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji signifikan seberapa besar pengaruh variabel independen (kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini BPK atas LKPD) secara bersama-sama terhadap variabel

dependen (kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang).

Tabel 4.29
Hasil Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Model	F	Sig.
Regression	3.691	0.012 ^b
Residual		
Total		

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2021

Hasil perhitungan dari tabel 4.29 diatas, mendapatkan nilai F-hitung sebesar 3,691 dan nilai probabilitas (sig) sebesar 0,012. Berikut penjelasan perhitungan untuk F-hitung dengan probabilitas (sig) dari tabel:

Ho: Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (X1), pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (X2), transparansi pengelolaan keuangan daerah (X3), penyerapan anggaran (X4), kondisi keuangan daerah (X5), dan opini BPK atas LKPD (X6) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang (Y).

Ha: Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (X1), pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (X2), transparansi pengelolaan keuangan daerah (X3), penyerapan anggaran (X4), kondisi keuangan daerah (X5), dan opini BPK atas LKPD (X6) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang (Y).

Pada penelitian ini menggunakan taraf signifikansi (α) yaitu 5 % atau 0,05 dan *degree of freedom* (df) dengan rumus df yaitu pembilang = k-1, sedangkan penyebut = n-k dengan keterangan n = jumlah sampel dan

k = jumlah seluruh variabel penelitian untuk melihat hasil perhitungan uji hipotesis dari nilai t -hitung. Jadi nilai df pembilang = $7-1 = 6$ sedangkan nilai df penyebut = $78-7 = 71$ dengan nilai F -tabel yaitu 2,23 dapat dilihat pada gambar tabel F sebagai berikut:

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05															
df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.95	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.95	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81

Gambar 4.5

Tabel F

Dari hasil pengujian simultan di tabel menunjukkan bahwa nilai F -hitung untuk variabel X_1 - X_6 yaitu $3,691 \geq 2,23$ yaitu F -tabel maka dapat diartikan **hipotesis diterima**. Sedangkan dilihat dari hasil perhitungan probabilitas (sig) memperoleh nilai sebesar $0,012 \leq 0,05$ sehingga dapat diartikan **signifikan dan hipotesis diterima**, disimpulkan ada pengaruh signifikan secara bersama-sama. Sehingga diartikan hasil uji simultan “Ada pengaruh signifikan kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (X_1), pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (X_2),

transparansi pengelolaan keuangan daerah (X3), penyerapan anggaran (X4), kondisi keuangan daerah (X5), dan opini BPK atas LKPD (X6) secara bersama-sama terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang (Y) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)”. Maka model regresi adalah baik dan layak untuk diteliti.

(3) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh semua variabel independen (kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini BPK atas LKPD) terhadap nilai variabel dependen (kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang). Koefisien determinasi memiliki besaran nilai dari angka 0 (nol) sampai angka 1 (satu).

Tabel 4.30

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.725 ^a	0.525	0.383	2.295

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2021

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam tabel 4.30 diatas, menunjukkan bahwa besarnya *Adjusted R Square* yaitu 0,383 atau 38,3% terlihat dari variabel kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang yang dapat dijelaskan oleh 6 (enam) variabel kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan

anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini BPK atas LKPD. Oleh karena itu, sisa dari *Adjusted R Square* yaitu 61,7% atau 0,617 ($100\% - 38,3\% = 61,7\%$) termasuk variabel lain yang belum digunakan atau faktor lain diluar model dalam penelitian ini. Jadi, walaupun nilai koefisien determinasi sudah dapat menjelaskan dari variabel dependen dengan variabel independen tetapi nilai tersebut dinyatakan kecil atau sudah mau mendekati angka 0, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga kecil atau menjadi lemah.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memiliki tujuan untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini BPK atas LKPD terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

4.4.1 Pengaruh Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang

Berdasarkan hasil analisis statistik yang menggunakan SPSS Statistics 22 dalam penelitian menunjukkan bahwa hasil **hipotesis pertama (H1)** dapat disimpulkan bahwa **ditolak** yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (X1) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang (Y) pada Organisasi Perangkat Daerah. Pengaruh positif tersebut menunjukkan bahwa adanya

kesesuaian pada dokumen perencanaan dan penganggaran meningkat dengan baik maka meningkatkan pencapaian kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang yang lebih baik. Pengaruh tidak signifikan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan pencapaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari kesesuaian penyusunan perencanaan dan penganggaran yang memiliki peranan sangat penting.

Alasan **hipotesis 1 (H1) ditolak** yaitu sebagai berikut: dokumen perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Semarang cukup sesuai dan selaras dalam penyusunannya, hanya ada beberapa hal yang belum sesuai dengan dokumen di periode renstra yang lama, dikarenakan penyusunannya dulu belum terintegrasi dalam satu sistem. Namun sekarang setelah dokumen perencanaan dan penganggaran menggunakan sistem yang terintegrasi berharap hasilnya bisa mencapai indeks SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang akan lebih baik, karena Renstra, Renja, KUA, RKA, dan DPA sudah menggunakan satu sistem. Serta dokumen perencanaan sering mengalami perubahan karena dipengaruhi perubahan kebijakan penganggaran utamanya perubahan prioritas dan penyesuaian dengan kondisi kemampuan keuangan daerah, sehingga mempengaruhi target kinerja yang sebelumnya ditetapkan.

Dilihat dari sisi teori keagenan dapat menjelaskan dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa dalam kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran harus melibatkan dua pihak yaitu eksekutif atau pemerintah sebagai agen dan legislatif atau masyarakat sebagai principal. Ketika eksekutif berkeinginan dalam memaksimalkan seluruh kepentingan mereka mulai dari kesesuaian proses perencanaan sampai dengan penganggaran dan pembuatan keputusan yang

menghadirkan kewajaran laporan keuangan untuk kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang selama ini sudah membaik.

Jadi, berpengaruh positif tidak signifikan dari hasil analisis hipotesis tersebut diartikan setiap perubahan variabel kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, maka secara statistik tidak dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang. Dengan begitu, sesuai atau tidak dokumen perencanaan dan penganggaran dapat mempengaruhi penurunan atau peningkatan target kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang yang sebelumnya ditetapkan.

Penelitian ini sejalan juga dengan penelitian (Matondang, 2015) yang menunjukkan bahwa sinkronisasi perencanaan dan penganggaran berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ariesmawati, 2020) yang menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja perangkat daerah pada Bappeda Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.

4.4.2 Pengaruh Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang

Berdasarkan hasil analisis statistik yang menggunakan SPSS Statistics 22 dalam penelitian menunjukkan bahwa hasil **hipotesis kedua (H2)** dapat disimpulkan bahwa **ditolak** yaitu pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (X2) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang (Y) pada Organisasi Perangkat Daerah. Pengaruh positif tersebut menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran belanja dalam APBD

meningkat baik maka meningkat baik kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang. Pengaruh tidak signifikan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik masih tergantung dari mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD yang benar.

Alasan **hipotesis 2 (H2) ditolak** yaitu sebagai berikut: pengalokasian anggaran belanja dalam APBD Kabupaten Semarang sudah baik tetapi masih belum dilakukan secara proporsional sesuai urgensi terhadap pencapaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan visi dan misi Pemerintah Daerah, melainkan masih cenderung berpatokan pada paradigma lama yang berorientasi pada fungsi organisasi. Serta kondisi yang demikian mengakibatkan kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang menjadi kurang efektif dan efisien karena penerapan *money follow function* masih kurang atau tidak diimbangi dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten di tiap-tiap organisasi perangkat daerah sesuai bidangnya, sehingga pemanfaatan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD untuk mendukung pencapaian kinerja pengelolaan keuangan daerah yang menjadi bias karena cenderung digunakan untuk mendanai hal-hal sebenarnya tidak menjadi prioritas terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. Serta pengalokasian anggaran belanja dalam APBD seharusnya ada untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur selain untuk belanja urusan daerah lainnya untuk pencapaian kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Dilihat dari sisi teori keagenan dapat menjelaskan dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa semakin tinggi belanja daerah maka semakin tinggi juga kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang. Serta terdapat konflik kepentingan antara pinsipal dengan agen, seperti kurangnya sinkronisasi

dalam mengalokasikan anggaran belanja yang sesuai visi misi Pemerintah Daerah dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Jadi, berpengaruh positif tidak signifikan yaitu **hipotesis 2 (H2) ditolak** dari hasil analisis hipotesis tersebut diartikan setiap perubahan variabel pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, maka secara statistik tidak dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang dikarenakan masih ada yang belum benar dalam mengalokasikan anggaran belanja maka kinerja pengelolaan keuangan daerah kurang efektif dan efisien. Seperti menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 167 Ayat 1 pada penelitian (Garini, 2015) yang berbunyi: “Semakin tinggi anggaran belanja daerah di suatu daerah memperlihatkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah tidak efektif dan efisien”.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Armaja, 2015) menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Aceh dan sejalan dengan penelitian (Garini, 2015) menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. tetapi tidak sejalan dengan penelitian (Ariwibowo, 2015) yang menunjukkan bahwa berpengaruh negatif signifikan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2013.

4.4.3 Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang

Berdasarkan hasil analisis statistik yang menggunakan SPSS Statistics 22 dalam penelitian menunjukkan bahwa hasil **hipotesis ketiga (H3)** dapat

disimpulkan bahwa **ditolak** yaitu transparansi pengelolaan keuangan daerah (X3) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang (Y) pada Organisasi Perangkat Daerah. Berpengaruh positif tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkat transparansi pengelolaan keuangan daerah kepada publik maka semakin meningkat kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang. Pengaruh tidak signifikan menunjukkan bahwa masih perlu adanya transparansi pengelolaan keuangan daerah kepada publik yang penting untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Alasan **hipotesis 3 (H3) ditolak** yaitu sebagai berikut: kebijakan transparansi pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik tetapi belum optimal karena masih terdapat pembatasan untuk membuka informasi pengelolaan keuangan kepada publik melalui media massa. Jika transparansi dilakukan sebagaimana harusnya, dapat bermanfaat menjadi sarana umpan balik bagi publik untuk memberikan masukan guna memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah pada periode selanjutnya. Serta transparansi pengelolaan keuangan daerah diperlukan, namun informasi transparansi tersebut seharusnya dilakukan oleh instansi yang membidangi tentang pengelolaan keuangan daerah.

Dilihat dari sisi teori keagenan dapat menjelaskan dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa pemerintah sebagai agen dituntut secara transparan kepada masyarakat sebagai prinsipal tetapi ketidakmampuan pemerintah dalam optimalisasikan kepentingan masyarakat banyak, seperti dalam penelitian ini masih

kurang keterbukaan memberikan informasi laporan keuangan yang transparan kepada masyarakat.

Jadi, berpengaruh positif tidak signifikan dari hasil analisis hipotesis tersebut diartikan setiap perubahan variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah, maka secara statistik tidak dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang. Dengan begitu, semakin kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah kepada publik maka kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang akan semakin kurang baik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purnama, 2016) dan (Putri, 2020) yang menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Serta penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nasution, 2018) yang menunjukkan bahwa secara parsial transparansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

4.4.4 Pengaruh Penyerapan Anggaran Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang

Berdasarkan hasil analisis statistik yang menggunakan SPSS Statistics 22 dalam penelitian menunjukkan bahwa hasil **hipotesis keempat (H4)** dapat disimpulkan bahwa **ditolak** yaitu penyerapan anggaran (X4) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang (Y) pada Organisasi Perangkat Daerah. Pengaruh positif tersebut menunjukkan bahwa penyerapan anggaran yang baik mendukung kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang yang baik. Pengaruh tidak signifikan menunjukkan bahwa kurang atau tidak pencapaian target penyerapan

anggaran mempengaruhi target kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Alasan **hipotesis 4 (H4) ditolak** yaitu sebagai berikut: kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang sangat ketergantungan pada penyerapan anggaran, penyerapan anggaran di Kabupaten Semarang sudah baik dan memenuhi target kinerja pengelolaan keuangan daerah. Namun, masih ada penyerapan anggaran yang kurang dari target, masih ada yang beranggapan bahwa penyerapan anggaran berbanding lurus dengan kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang, dan kondisi ini membuat penumpukan anggaran di akhir tahun dari penyerapan anggaran tersebut sangat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Dilihat dari sisi teori keagenan dapat menjelaskan dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah seharusnya perlu ada mekanisme sistem kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam proses pengelolaan penyerapan anggaran agar tidak terjadi masalah yang akan muncul sewaktu-waktu, seperti dalam penelitian ini adanya penumpukan anggaran di akhir tahun dari penyerapan anggaran.

Jadi, berpengaruh positif tidak signifikan dari hasil analisis hipotesis tersebut diartikan setiap perubahan variabel penyerapan anggaran, maka secara statistik tidak dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang. Dengan begitu, masih ada yang belum mampu melakukan fungsi penyerapan anggaran dengan benar yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Priagung et al., 2016) menunjukkan bahwa penyerapan anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Banjarnegara dan tidak sejalan dengan penelitian (Arniwita et al., 2019) menunjukkan bahwa penyerapan anggaran belanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi Pemerintah Provinsi Jambi.

4.4.5 Pengaruh Kondisi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang

Berdasarkan hasil analisis statistik yang menggunakan SPSS Statistics 22 dalam penelitian menunjukkan bahwa hasil **hipotesis kelima (H5)** dapat disimpulkan bahwa **ditolak** yaitu kondisi keuangan daerah (X5) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang (Y) pada Organisasi Perangkat Daerah. Pengaruh negatif tersebut menunjukkan bahwa kondisi keuangan daerah keuangan semakin meningkat maka kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang semakin menurun. Pengaruh tidak signifikan tersebut menunjukkan bahwa kondisi keuangan daerah masih kurang baik dapat dilihat dari nilai pendapatan asli daerah yang masih ketergantungan kepada Pemerintah Pusat terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Alasan **hipotesis 5 (H5) ditolak** yaitu sebagai berikut: kondisi keuangan masih rendah, dikarenakan masih perlu mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan asli daerah. Serta walaupun sudah baik, tetapi masih ada kondisi keuangan Kabupaten Semarang masih rendah dan ketergantungan pada dana-dana transfer dari Pemerintah Pusat, sehingga kinerja pengelolaan keuangan daerah perlu

ditingkatkan khususnya dalam penggalian potensi-potensi pendapatan asli daerah yang dapat berkontribusi secara signifikan untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

Dilihat dari sisi teori keagenan dapat menjelaskan dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa Kabupaten Semarang termasuk negara demokrasi yang memiliki hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah dengan masyarakat, seperti di Kabupaten Semarang yang kondisi keuangan daerah masih ketergantungan kepada Pemerintah Pusat.

Jadi, berpengaruh negatif tidak signifikan dapat diartikan setiap perubahan variabel kondisi keuangan daerah, maka secara statistik tidak dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang. Hal tersebut menunjukkan bahwa baik atau buruknya kinerja pengelolaan keuangan suatu daerah dapat ditentukan dari pendapatan yang diterima daerah tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Andirfa, 2016) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Leki, 2018) menunjukkan bahwa kondisi keuangan daerah dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Halmahera Barat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Halmahera Barat dan tidak sejalan juga dengan penelitian (Tahir et al., 2018) menunjukkan bahwa faktor pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Makassar.

4.4.6 Pengaruh Opini BPK Atas LKPD Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang

Berdasarkan hasil analisis statistik yang menggunakan SPSS Statistics 22 dalam penelitian menunjukkan bahwa hasil **hipotesis keenam (H6)** dapat disimpulkan bahwa **ditolak** yaitu opini BPK atas LKPD (X6) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang (Y) pada Organisasi Perangkat Daerah. Pengaruh negatif tersebut menunjukkan bahwa opini BPK atas LKPD semakin meningkat maka kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang semakin menurun. Pengaruh tidak signifikan tersebut menunjukkan bahwa opini BPK yang diberikan atas LKPD sangat berperan penting maka kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang yang masih diperlukan penilaian lainnya.

Berikut alasan **hipotesis 6 (H6) ditolak**, yang dapat dilihat dari hasil analisis hipotesis tersebut yaitu dikarenakan auditor BPK hanya memfokuskan menilai kewajaran laporan keuangan daerah sesuai sistem pengendalian internal yang menjadi salah satu dasar dalam mengungkapkan pendapatnya, dan juga hanya melihat dari akun-akun serta catatan akuntansi yang sesuai prinsip-prinsip akuntansi terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang di setiap organisasi perangkat daerah. Dibuktikan dengan auditor BPK sudah memberikan opini WTP sebanyak 10 kali berturut-turut di Kabupaten Semarang.

Dilihat dari sisi teori keagenan dapat menjelaskan dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang sudah diawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan tersebut dilakukan oleh BPK atas

LKPD. Salah satunya dengan memberikan opini WTP sebanyak 10 kali secara berturut-turut dikarenakan sebagai alat ukur penilaian kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang yang sangat penting bagi masyarakat.

Jadi, berpengaruh negatif tidak signifikan dari hasil analisis hipotesis tersebut diartikan setiap perubahan variabel opini BPK atas LKPD, maka secara statistik tidak mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang dikarenakan opini WTP yang diberikan BPK tersebut masih belum dapat mencerminkan bahwa anggaran yang dikelola Perangkat Daerah sudah efektif dan efisien.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Pradnyani, 2020) menunjukkan bahwa opini audit BPK berpengaruh positif pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2013-2017. Tetapi ada penelitian yang tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Parwanto, 2017) menunjukkan bahwa tidak semua hasil pemeriksaan BPK berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dan penelitian yang dilakukan oleh (Haristri, 2019) menunjukkan bahwa opini pemeriksaan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini BPK atas LKPD terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Semarang pada bab 4 sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan hipotesis pertama ditolak, diartikan bahwa setiap perubahan variabel kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran maka secara statistik tidak dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang. Dengan begitu, sesuai atau tidak dokumen perencanaan dan penganggaran dapat mempengaruhi penurunan atau peningkatan target kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang yang sebelumnya ditetapkan.
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan hipotesis kedua

ditolak, diartikan bahwa setiap perubahan variabel pengalokasian anggaran belanja dalam APBD maka secara statistik tidak mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang. Hal ini terjadi karena masih ada yang belum benar dalam mengalokasikan anggaran belanja maka kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang kurang efektif dan efisien.

3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak ada pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan hipotesis ketiga ditolak, diartikan bahwa setiap perubahan variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah maka secara statistik tidak dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang. Dengan begitu, semakin kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah maka kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang akan semakin tidak baik.
4. Penyerapan anggaran tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan hipotesis keempat ditolak, diartikan bahwa setiap perubahan variabel penyerapan anggaran maka secara statistik tidak dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang. Dapat dilihat secara keseluruhan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Semarang masih ada yang belum mampu melakukan fungsi penyerapan anggaran dengan benar

yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

5. Kondisi keuangan daerah tidak ada pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan hipotesis kelima ditolak, artinya bahwa setiap perubahan variabel kondisi keuangan daerah maka secara statistik tidak dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang. Hal tersebut menunjukkan bahwa baik atau buruknya kinerja pengelolaan keuangan suatu daerah dapat ditentukan dari pendapatan yang diterima daerah tersebut.
6. Opini BPK atas LKPD tidak ada pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan hipotesis keenam ditolak, artinya bahwa setiap perubahan variabel opini BPK atas LKPD, maka secara statistik tidak mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang dikarenakan opini WTP yang diberikan BPK tersebut masih belum dapat mencerminkan bahwa anggaran yang dikelola Perangkat Daerah sudah efektif dan efisien.
7. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini BPK atas LKPD secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang pada Organisasi Perangkat Daerah dan secara simultan dinyatakan hipotesis diterima.

5.2 Implikasi

Pada penelitian ini terdapat 2 (dua) implikasi yaitu pertama implikasi teoritis dan kedua implikasi praktis. Implikasi teoritis merupakan perkembangan teori-teori tentang “Analisis Pengaruh Dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang”, sedangkan implikasi praktis merupakan orang-orang yang sudah ikut berpartisipasi dalam penelitian terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

1. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis bagi peneliti yaitu peneliti berharap dalam penelitian ini dapat menerapkan teori dan memperoleh pemahaman tentang “Analisis Pengaruh Dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang”.

2. Implikasi praktis

Implikasi praktis bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan 6 (enam) dimensi indeks pengelolaan keuangan daerah yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah dan opini BPK atas LKPD terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, masih terdapat beberapa keterbatasan saat melakukan penelitian yang dimiliki peneliti, sebagai berikut penjelasannya:

1. Populasi dan sampel yang terbatas yaitu hanya pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Semarang yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, data yang diperoleh hanya ada dalam ruang lingkup Kabupaten Semarang.
2. Penelitian ini hanya menggunakan teknik pengumpulan data melalui google form untuk menyebarkan kuesioner penelitian. Dengan adanya keadaan pandemi covid-19 yang tidak mendukung peneliti pada saat melakukan penelitian dengan teknik pengumpulan data yang lain, seperti wawancara. Oleh karena itu, google form yang digunakan dalam penyebaran kuesioner penelitian membuat peneliti kesulitan memastikan apakah responden mengisi kuesioner dengan benar atau tidak.
3. Menurut peneliti, penyebaran kuesioner masih kurang efektif dan efisien dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa karakteristik. Dengan begitu, penyebaran kuesioner melalui google form membuat peneliti tidak mendapatkan data kuesioner yang sesungguhnya dan belum bisa digunakan dalam pertanggungjawaban data kuesioner dari responden yang telah mengisi kuesioner tersebut.

5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Peneliti masih melihat adanya kekurangan dalam penelitian ini, maka diharapkan jika ada penelitian yang sama dan akan dilakukan dimasa yang akan datang dapat lebih memperbaiki dari kekurangan tersebut yang ada di penelitian ini.

Sebagai berikut saran untuk peneliti selanjutnya dimasa yang akan datang:

1. Pada penelitian yang akan datang diharapkan dapat mengubah atau menambah variabel-variabel lain yang belum ada dalam penelitian ini, seperti variabel akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan alasan yaitu menurut teori agency, pengelolaan pemerintah daerah harus dipantau untuk menjamin bahwa itu dilakukan sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan berlaku. Oleh karena itu, meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah maka informasi yang diperoleh masyarakat menjadi lebih sesuai dengan pemerintah daerah sehingga mengurangi asimetri informasi yang terlihat (Algameta, 2016).
2. Diharapkan penelitian yang akan datang dapat mengganti populasi dan sampel yang digunakan, dikarenakan penelitian ini hanya ada dalam ruang lingkup di Kabupaten Semarang.
3. Bagi peneliti yang akan datang dapat melengkapi penelitian dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, agar data yang diperoleh dari responden merupakan data kuesioner yang sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan data tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. Y. (2019). HUBUNGAN BUDAYA ETIS, KETAATAN ATURAN AKUNTANSI, PENEGAK PERATURAN, KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP FREKUENSI KECURANGAN PADA SEKTOR PEMERINTAH DESA (Studi Kasus Pemerintah Kecamatan Sayung Demak). *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung.
- Ademirna. (2016). PENGARUH KINERJA KEUANGAN, OPINI AUDIT, DAN LINGKUNGAN MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN PENGUNGKAPAN INFORMASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN AKUNTABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Gowa). *SKRIPSI*, UIN Alauddin Makassar.
- Admin. (2021). *Headline, Nasional, Pemerintahan, Utama*. Dipetik Mei 25, 2021, dari ungarannews.com: <https://ungarannews.com/2021/05/25/raih-opini-wtp-kese puluh-berturut-turut-bupati-semarang-terima-kasih-eksekutif-dan-legislatif/>
- Agung, R. (2021). *Semarang*. Dipetik September 14, 2021, dari suaramerdeka.com: <https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/pr-041167155/komitmen-mempertahankan-transparansi-laporan-keuangan-kabupaten-semarang-terima-opini-wtp-ke-10?page=all>
- Algameta, M. F. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Al-Latief, M. A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Bagian Utara. *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara Medan.
- Andirfa, M. d. (2016). PENGARUH BELANJA MODAL, DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI ACEH. *Jurnal Magister Akuntansi*, 5(3), 30-38.
- Anisa, B. C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Dana Perimbangan dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. *Artikel Ilmiah*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
- Anisa, D. R. (2017). PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1), 134-147.
- Ariesmawati, Y. (2020). Pengaruh Perencanaan dan Penganggaran terhadap Kinerja Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Kabupaten Kutai Timur . *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 6(2), 258-269.
- Ariwibowo, T. (2015). PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI.
- Armaja, I. R. (2015). Pengaruh kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2).
- Arniwita et al. (2019). DAMPAK PENYERAPAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Kasus di Provinsi Jambi). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 166-170.
- Astuti, A. D. (2020). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN VIA WEBSITE (STUDI EMPIRIS KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TIMUR PERIODE 2018). *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 9.
- Baharani, R. Y. (2020). MODEL AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA SEMARANG TAHUN 2019. *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung.
- Elim et al. (2018). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KOTA KUPANG. *JURNAL AKUNTANSI, KEUANGAN, DAN AUDIT*, 3(2), 46-56.
- Garini, A. (2015). PENGARUH BELANJA DAERAH, TEMUAN AUDIT DAN SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *SKRIPSI*, Universitas Negeri Semarang.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gumelar, G. (2018). *Ekonomi, Makro*. Dipetik Juli 19, 2018, dari cnnindonesia.com:
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180719175926-532-315514/sri-mulyani-sebut-opini-wtp-tak-jamin-kementerian-efesien>
- Haristri, O. D. (2019). PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN BPK RI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH. *SKRIPSI*, Universitas Islam Sultan Agung.
- Hidayat, R. (2015). PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman). *ARTIKEL ILMIAH*, Universitas Negeri Padang.
<https://main.semarangkab.go.id/perangkat-daerah/>
- I, L. (2020). *Edukasi*. Dipetik Juli 13, 2020, dari bpk.go.id:
<https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>
- Iqbal, M. (2018). PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI PEMODERASI. *TESIS*, Universitas Hasanuddin Makassar.

- Krejcie, R. V. (1970). Determining Sample Size For Research Activities. *Educational And Psychological Measurement*, 30, 607-610.
- Krestianwan, L. (2015). PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI EMPIRIS PADA SKPD KABUPATEN PONOROGO). *SKRIPSI*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Leki, Y. N. (2018). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(05).
- Maizunati, N. A. (2017). ANALISIS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG DALAM KLASTER KOTA DI JAWA-BALI. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 2(2), 140-161.
- Matondang, N. I. (2015). Pengaruh Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran, Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja SKPD pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Administrasi Akuntansi*, Program Pascasarjana Unsyiah, 4(4).
- Mutiasari, L. (2018). ANALYSIS OF EMPLOYER ATTRACTIVENESS AND USE OF SOCIAL MEDIA TO CORPORATE REPUTATION AND JOB CHARACTERISTICS ASTRA CREDIT COMPANIES AND IMPLICATION ON INTENTION TO APPLY: STUDY AT END LEVEL STUDENT JABODETABEK. *THESIS*, MULTIMEDIA NUSANTARA UNIVERSITY.
- Nasution, D. A. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149-162.
- Novianti, A. (2017). Pengaruh Penyajian, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Bandar Lampung). *SKRIPSI*, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung.
- Parwanto, E. &. (2017). PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *JURNAL AKUNTANSI*, 6(1), 1-9.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018. *Penerapan Standar Pelayanan Minimal*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020. *Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020. *Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020. *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017. *Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005. *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017. *Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019. *Pengelolaan Keuangan daerah*.
- Permana, D. A. (2019). *News, Regional*. Dipetik November 12, 2019, dari regional.kompas.com:
<https://regional.kompas.com/read/2019/11/12/06205551/8-kali-berturut-turut-terima-opini-wtp-insentif-daerah-kabupaten-semarang>
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. *Laporan Realisasi Anggaran (LRA)*.
- Prabawanti, M. A. (2020). *News, Nasional*. Dipetik Mei 6, 2020, dari nasional.kompas.com:
<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/06/15515011/bpk-temukan-5480-permasalahan-pengelolaan-anggaran-pusat-dan-daerah>
- Pradnyani, N. M. (2020). Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Realisasi PAD sebagai Pemediasi. *Jurnal Akuntansi*, 30(12), 3150-3161.
- Priagung et al. (2016). Pengaruh Penyerapan Anggaran, Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja Dan Pengawasan Inspektorat Terhadap Kinerja Keuangan Organisasi Publik (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 1-15.
- Purnama, F. &. (2016). PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH, AKUNTABILITAS, DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 01-15.
- Putri, A. S. (2020). PENGARUH TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH, DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO. *SKRIPSI*, Universitas Muhammadiyah Metro.
- Ramadhani, D. &. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1), 134-147.
- Riswan, &. A. (2014). PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF TEORI KEAGENAN. *JURNAL Akuntansi & Keuangan*, 71-90.
- Saifulloh, I. (2020).
- Saraswati, E. (2018). Efisiensi dan Efektivitas Manajemen Keuangan Daerah (Survey pada Pemda di Jawa Timur). *SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA*, Universitas Brawijaya Malang Indonesia.
- Sriwijayanti, H. (2018). Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pemanfaatan Sitem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD (Studi Persepsi Pengelola APBD SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang). *Jurnal EKOBISTEK*, 7(1), 88-101

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surastowo. (2019). ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. *JURNAL SIMPLEX*, 2(3), 175-185.
- Suryani, B. H. (2016). ANALISIS KONDISI KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI ACEH DAN DI SUMATERA UTARA. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 63-71.
- Tahir et al. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAKASSAR. 61-70.
- Tambun, L. T. (2020). *Nasional*. Dipetik November 11, 2020, dari beritasatu.com: <https://www.beritasatu.com/nasional/697539/presiden-jokowi-apresiasi-opini-wtp-kementerianlembaga-yang-makin-baik>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. *Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004. *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004. *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009. *Kesehatan*.
- Widiyanta, M. (2017). PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DENGAN PENDEKATAN VALUE FOR MONEY PADA SKPD KULON PROGO. *SKRIPSI, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA*.
- Wulandari, A. &. (2019). Pengaruh Kinerja Pemerintah Daerah dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Voluntary Graphics Disclosure Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2017. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(4), 1896-1915.
- Yuliani, V. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Triwulan IV Tahun 2019 Pada UPTD Puskesmas Di Kabupaten Tegal. *SKRIPSI, Universitas Pancasakti Tegal*.
- Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 7(1), 11-21.